



Cerdas
Berkarakter

Laporan Kinerja

PUSAT

PENGUATAN

KARAKTER

Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi



Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi tentang ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Penguatan Karakter tahun 2024. Kinerja Pusat Penguatan Karakter pada tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum Pusat Penguatan Karakter telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, tetap ada permasalahan dan tantangan yang perlu dioptimalisasi di tahun mendatang. Tantangan tersebut seperti masih belum optimalnya kolaborasi antara Puspeka dengan pemangku kepentingan di daerah terkait pelaksanaan program penguatan karakter. Dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan implementasi penguatan karakter berjalan dengan baik.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja Pusat Penguatan Karakter pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Pusat Penguatan Karakter pada tahun 2024.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Pusat Penguatan Karakter



Rusprita Putri Utami, S.E., M.A.

NIP 198309052009122005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
Gambaran Umum	7
Dasar Hukum.....	8
Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	9
Isu-Isu dan Peran Strategis Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
Visi.....	13
Misi.....	13
Tujuan Strategis.....	13
Rencana Kinerja Jangka Menengah	17
Program Prioritas 2020-2024.....	18
Rencana Kerja dan Anggaran	18
Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
Capaian Kinerja	23
Realisasi Anggaran	78
Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/ <i>Collaborative</i>	79
BAB IV PENUTUP	88
Simpulan Umum.....	88
Rekomendasi	89
LAMPIRAN	91

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Penguatan Karakter Tahun 2024 menyajikan informasi capaian 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja diuraikan lebih detail di BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

Pagu Anggaran

Rp. 67.876.276.000

Realisasi

Rp. 64.419.003.051

Persentase

94,91%

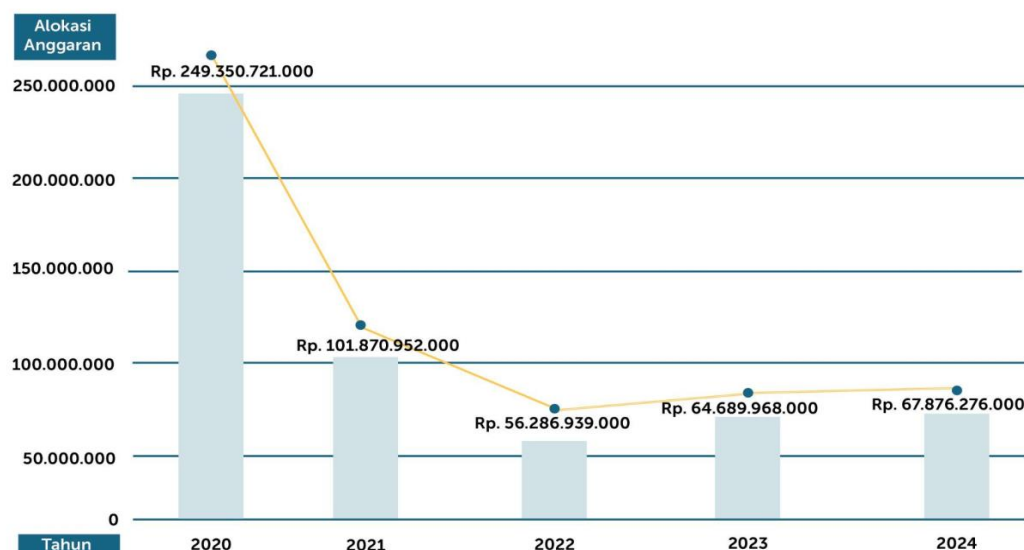
Diagram Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penguatan Karakter

SK 1	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan	Target	Capaian	Persentase
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	548	548	100%
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	548	548	100%
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	548	548	100%
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter ekosistem pendidikan	548	548	100%

SK 2	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	Target	Realisasi	Persentase
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter Minimal BB	A	AA	100,55%
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	96,91	98,90	102,05%

Berikut tren alokasi anggaran Pusat Penguatan Karakter dari tahun 2020 sampai 2024



Berdasarkan grafik di atas, alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, hal tersebut dipengaruhi karena adanya penyesuaian program prioritas pada kampanye penguatan karakter.

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Beberapa daerah sasaran diseminasi produk penguatan karakter memiliki kondisi geografis yang menyulitkan untuk mengikuti kegiatan secara luring dan keterbatasan koneksi internet untuk mengikuti kegiatan secara daring;
2. Beberapa satuan pendidikan (6,17%) belum membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan beberapa pemerintah daerah (14,06%) belum membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP) karena keterbatasan sumber daya dan lokasi satuan pendidikan daerah sulit dijangkau oleh perangkat daerah dan UPT Kementerian;
3. Beberapa anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP), TPPK, dan fasilitator program baik program pencegahan perundungan, PPKSP, dan pencegahan kekerasan seksual belum memiliki kompetensi yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya karena peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Puspeka belum mampu menjangkau semua daerah secara luring. Beberapa daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas secara daring terkendala perangkat dan jaringan yang kurang memadai;
4. Belum optimalnya kolaborasi antara Puspeka dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program penguatan karakter di daerah;

5. Belum semua daerah menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk penguatan karakter sehingga beberapa daerah belum mengimplementasikan secara maksimal program penguatan karakter.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, antara lain:

1. Memproduksi dan mengkampanyekan produk penguatan karakter melalui *above the line* (melalui media massa dan media sosial) dan melalui *below the line* (sosialisasi, diskusi kelompok terpumpun, diseminasi, dan lain-lain);
2. Puspeka berkolaborasi dengan UPT mendorong dan mengadvokasi pemerintah daerah untuk membentuk Satgas PPSKP, dan satuan pendidikan untuk membentuk TPPK;
3. Memaksimalkan peran UPT untuk mengadvokasi dan menyebarkan informasi program penguatan karakter, serta aktif menyebarkan materi pada media sosial dan laman Puspeka;
4. Melakukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan program penguatan karakter serta program pencegahan dan penanganan kekerasan;
5. Berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk penguatan karakter dan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran Kemendagri.



BAB I

Pendahuluan

Gambaran Umum

Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) merupakan satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang dibentuk untuk mendukung keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai program prioritas Kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berfokus kepada penguatan pendidikan karakter. Selain itu, munculnya berbagai isu yang tidak selaras dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, seperti intoleransi, kekerasan seksual, perundungan, dan bentuk kekerasan lainnya di satuan pendidikan mendorong perlunya unit khusus yang mengoordinasi penuntasan isu-isu tersebut. Puspeka diharapkan dapat memastikan kebijakan terkait Penguatan Karakter dapat dipahami oleh ekosistem pendidikan yaitu satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat.

Amanat utama yang disandarkan terhadap Puspeka adalah untuk membumikan Pancasila agar dipahami dan mudah diaplikasikan oleh generasi muda bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Mendikbudristek pada saat rapat kerja dengan Komisi X DPR (Bidang Pendidikan) pada tanggal 28 Januari 2020. Amanat itulah yang mendasari Puspeka untuk melakukan strategi kampanye komunikasi publik jangkauan luas dan terbatas (*below the line* dan *above the line*), dengan harapan bisa membuat masyarakat sadar, paham, ikut berpartisipasi dalam upaya tercapainya tujuan perubahan paradigma dan perilaku di lingkungan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Puncaknya, tercipta sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024).

Puspeka merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi Kemendikbudristek di bidang penguatan karakter yang berperan sebagai koordinator (*leading sector*) di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, Puspeka berkoordinasi dengan berbagai satuan kerja pada unit-unit utama di lingkungan Kemendikbudristek serta menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga maupun pemangku kepentingan lainnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puspeka telah merumuskan prinsip budaya kerja internal yaitu PUSPEKA yang merupakan akronim dari, **P** untuk Profesional, **U** untuk Unggul, **S** untuk Sinergis, **P** untuk Prima, **E** untuk Empati, **K** untuk Kreatif, dan **A** untuk Amanah. Prinsip tersebut menjadi acuan atau internalisasi yang harus dilaksanakan dan dibudayakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Puspeka.

P	Profesional bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
U	Unggul mampu memberdayakan kelebihan atau potensi/talenta yang ada di Puspeka seraya mengoptimalkan peluang-peluang dari lingkungan lainnya
S	Sinergis membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
P	Prima memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman
E	Empati mampu untuk bisa merasakan atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain
K	Kreatif mampu untuk memiliki daya cipta
A	Amanah dapat dipercaya

Gambar Budaya Kerja Puspeka

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; dan
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

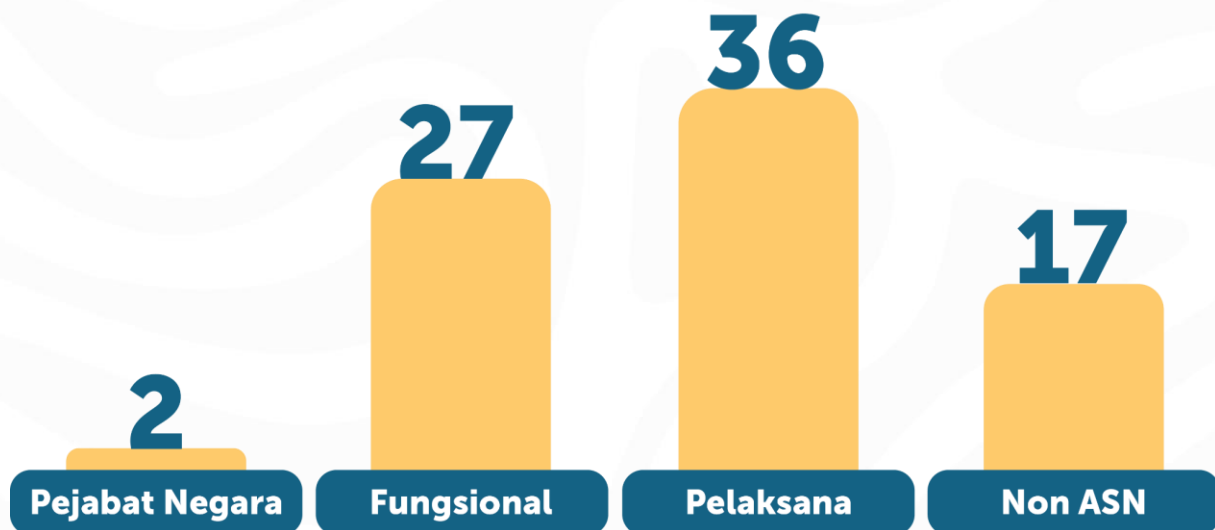
Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Puspeka memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pusat Penguatan Karakter menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
2. Pelaksanaan penguatan karakter;
3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;

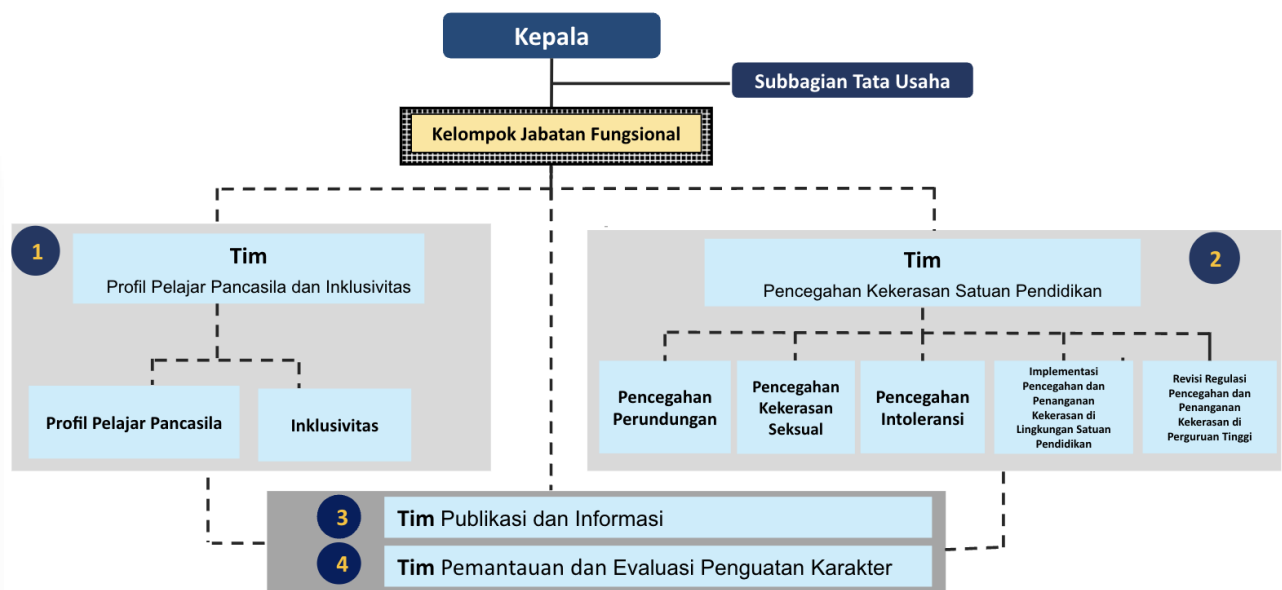
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Per 31 Desember 2024, Pusat Penguatan Karakter memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 86 orang yang terdiri dari 2 Pejabat Struktural, 27 pejabat fungsional, 36 pelaksana, dan 17 Non-ASN, dengan proporsi sebagai berikut:



Jumlah Pegawai Pusat Penguatan Karakter

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, struktur Pusat Penguatan Karakter terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan bagan sebagai berikut:



Struktur Organisasi Puspeka

Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi Pusat Penguatan Karakter, Kepala Pusat Penguatan Karakter membentuk tim kerja sesuai dengan SK



Nomor 0010/SK/PUSPEKA/2024 tentang Penetapan Ketua Tim Tahun 2024 pada Kemendikbudristek. Adapun setiap tim mendukung dan bertanggungjawab pada tugas dan fungsi Puspeka, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tim Profil Pelajar Pancasila dan Inklusivitas

Melaksanakan kegiatan penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila dan Inklusivitas;

2. Tim Pencegahan Kekerasan Pendidikan

Melaksanakan kegiatan penguatan karakter terkait pencegahan tiga isu kekerasan di dunia pendidikan (kekerasan seksual, perundungan, intoleransi), melakukan implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, serta melakukan revisi regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi;

3. Tim Publikasi dan Informasi

Melaksanakan kolaborasi dan sinergitas dalam publikasi dan informasi penguatan karakter

4. Tim Pemantauan dan Evaluasi

Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan karakter; serta

5. Tim Tata Usaha

Melaksanakan kegiatan ketatausahaan pusat.

Isu-Isu dan Peran Strategis Organisasi

Isu Strategis

- a. Belum optimalnya intervensi langsung dari Puspeka ke pemerintah daerah terkait materi penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila, penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, serta toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan;
- b. Belum optimalnya pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas Tingkat pemerintah daerah sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023;
- c. Meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi mendorong Kemendikbudristek untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan melalui regulasi yang mencakup segala bentuk kekerasan, tidak hanya mengatur terkait kekerasan seksual seperti yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021;



- d. Sebanyak 34,51% peserta didik, atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual (Asesmen Nasional, 2022) sehingga satuan pendidikan perlu mendapatkan materi terkait pencegahan kekerasan seksual;
- e. Sebanyak 36,31% peserta didik, atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan (Asesmen Nasional 2022) sehingga satuan pendidikan perlu mendapatkan materi dan mengimplementasikan Program Pencegahan Perundungan;
- f. Terjadi peningkatan tren sikap intoleransi di kalangan pelajar yang didukung oleh data Rapor Pendidikan bahwa 68% satuan pendidikan perlu dibantu untuk mengoptimalkan Iklim Kebinekaan.

Peran Strategis

- a. Melaksanakan Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila kepada ekosistem pendidikan, baik berupa penyusunan kebijakan, program, pelibatan ekosistem, dan kampanye public;
- b. Mewujudkan Inklusivitas, Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, dan Pembelajaran Demokratis baik berupa penyusunan kebijakan, program, pelibatan ekosistem, dan kampanye publik pada ekosistem Pendidikan;
- c. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan baik berupa perumusan kebijakan, melaksanakan program pencegahan kekerasan, pelibatan ekosistem, melakukan kampanye anti kekerasan, dan optimalisasi daerah yang belum membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta optimalisasi pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan;
- d. Melakukan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tinggi melalui penyusunan regulasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 serta pemanfaatan *Learning Management System*/portal merdeka dari kekerasan;
- e. Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan melalui penyebarluasan materi pencegahan kekerasan seksual pada satuan Pendidikan;
- f. Melakukan Pencegahan Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan melalui peningkatan kapasitas Program Pencegahan Perundungan pada satuan Pendidikan;
- g. Melakukan pencegahan sikap intoleransi dan memperkuat kebinekaan melalui penyebaran berbagai produk kebinekaan untuk warga satuan pendidikan.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, PUSPEKA mendukung dan menjadi bagian dari visi dan misi Kemendikbudristek, yaitu:

Visi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan karakter yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tujuan Strategis

Tujuan strategis pada Pusat Penguatan Karakter yaitu meningkatnya internalisasi penguatan karakter.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis PUSPEKA Tahun 2020-2024, merumuskan kinerja yang dicapai di tahun 2024 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Awal pada Tabel sebagai berikut:



Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2024
Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota	548
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota	548
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota	548
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter ekosistem pendidikan	Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota	548
Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	Nilai	96,91

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran Perjanjian Kinerja Awal
4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 10.944.487.000
6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 56.931.789.000
Total		Rp. 67.876.276.000

Puspeka memiliki program prioritas di tahun 2024, meliputi:

1. Layanan Penguatan Karakter terkait Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan sehingga terwujud SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek;

Dalam pelaksanaan layanan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila, PUSPEKA melakukan:

- a) penyusunan kebijakan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila melalui analisis, pemetaan, pengembangan, kajian, koordinasi penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila;
- b) pelaksanaan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila dengan melakukan perancangan, produksi konten, penyebaran, dan pendampingan; dan,
- c) supervisi, pemantauan, dan evaluasi penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila.

2. Layanan Penguatan Karakter terkait Iklim Keamanan Satuan Pendidikan

Iklim keamanan satuan pendidikan merupakan tingkat rasa aman dan kenyamanan siswa di lingkungan satuan pendidikan, sistem pembelajarannya bersifat kooperatif, menghormati dan saling percaya. Siswa sebagai seorang pelajar hampir setiap hari berada di sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, sehingga mereka cukup akrab bergaul dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah tersebut meliputi fasilitas sekolah yang memadai, bagaimana hubungan siswa dengan guru, tata tertib sekolah serta norma dan sanksi yang diterapkan. Guna mendukung iklim sekolah yang positif maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyusun Indeks Iklim Keamanan Sekolah. Indeks Iklim Keamanan Sekolah adalah skor iklim keamanan satuan pendidikan yang memperhatikan beberapa faktor, antara lain perundungan hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan layanan penguatan karakter iklim keamanan satuan pendidikan, Puspeka melakukan:

- a) penyusunan kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan melalui analisis, pemetaan, pengembangan, kajian, koordinasi penguatan iklim keamanan satuan pendidikan;
- b) pelaksanaan kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan dengan melakukan perancangan, produksi konten, penyebaran, pendampingan, peningkatan kapasitas program pencegahan perundungan, fasilitasi dan kolaborasi program pencegahan perundungan, peningkatan kapasitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, diseminasi modul pembelajaran pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan, penguatan TPPK dan satuan tugas dan pencegahan dan penanganan kekerasan, serta advokasi implementasi produk pencegahan intoleransi; dan
- c) supervisi, pemantauan dan evaluasi penguatan karakter iklim keamanan satuan pendidikan.

3. Layanan Penguatan Karakter terkait Inklusivitas dan Kebinekaan Satuan Pendidikan

Layanan Penguatan Karakter terkait Inklusivitas dan Kebinekaan bertujuan untuk memberikan akses yang setara bagi semua siswa tanpa terkecuali, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terlepas dari latar belakang agama, gender, perbedaan ras, suku, maupun kebutuhan dan kemampuan khusus yang dimiliki. Pendidikan yang inklusif menghargai dan mendukung setiap individu sesuai dengan kebutuhan baik melalui penyesuaian kurikulum, pelibatan secara adil, maupun penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas. Layanan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebinekaan berperan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkesempatan bagi semua, serta membantu siswa untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, sosial, dan emosional mereka. Layanan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebinekaan melingkupi perwujudan pendidikan yang inklusif, toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran demokratis. Dalam pelaksanaan layanan penguatan karakter inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan, PUSPEKA melakukan:

- a) penyusunan kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan melalui analisis, pemetaan, pengembangan, kajian, koordinasi penguatan karakter inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan;
- b) pelaksanaan kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan dengan melakukan perancangan, produksi konten, penyebarluasan, pendampingan, sosialisasi, diseminasi, dan advokasi peningkatan inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan; dan
- c) supervisi, pemantauan dan evaluasi penguatan karakter inklusivitas dan kebinekaan di satuan pendidikan.

Rencana Kinerja Jangka Menengah

Puspeka telah menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tabel Target Indikator Kinerja Kegiatan 2020 - 2021

Kode	Uraian	Satuan	Target	
			2020	2021
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan			
IKK 1.1	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	30	30
IKK 1.2	Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	30	30
IKK 1.3	Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	30	30
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter			
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	BB	BB
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	Nilai	85	86

Tabel Target Indikator Kinerja Kegiatan 2022 - 2024

Kode	Uraian	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan				
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	Provinsi dan Kab/Kota	219	356	548
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	Provinsi dan Kab/Kota	191	356	548
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	Provinsi dan Kab/Kota	164	328	548
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	Provinsi dan Kab/Kota	-	328	548

Kode	Uraian	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter				
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	BB	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	Nilai	90,45	90,8	96,91

Program Prioritas 2020-2024

Pusat Penguatan Karakter dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang diluncurkan pada Merdeka Belajar Episode ke-14 dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang diluncurkan pada Merdeka Belajar Episode ke-25.

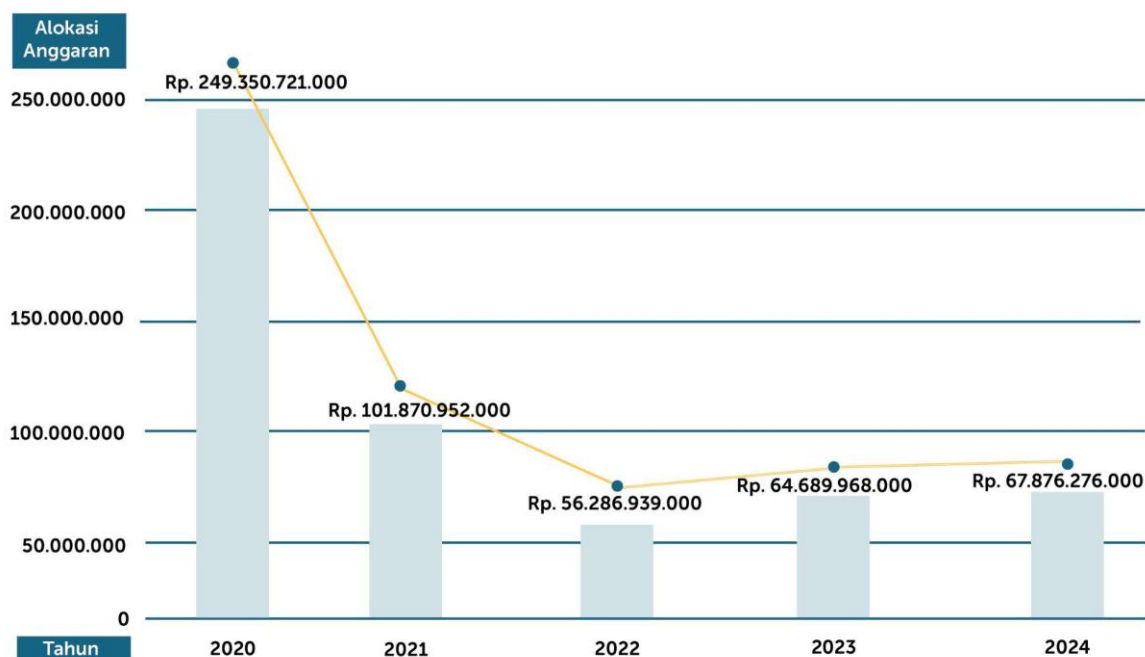
Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh Pusat Penguatan Karakter, sebagai berikut:

Tabel Program Prioritas Puspeka

No	Nama Program Prioritas	Target 2024	Alokasi Anggaran 2024
1.	Layanan Penguatan Karakter terkait Profil Pelajar Pancasila	6 layanan	Rp. 16.242.759.000
2.	Layanan Penguatan Karakter terkait Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	3 Layanan	Rp. 31.692.387.000
3.	Layanan Penguatan Karakter terkait Inklusivitas dan Kebinekaan Satuan Pendidikan	2 Layanan	Rp. 8.996.643.000

Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Pusat Penguatan Karakter menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Pusat Penguatan Karakter. Berdasarkan alokasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan signifikan pada awal periode yang kemudian diikuti dengan stabilisasi pada tiga tahun terakhir. Berikut adalah penjelasan rinci terkait tren anggaran ini:



Tahun 2020

Alokasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.249.350.721.000, yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Hal disebabkan oleh kebutuhan Anggaran besar untuk pelaksanaan program prioritas Belajar dari Rumah (BDR) yang didukung oleh Pusat Penguatan karakter, dalam penyesuaian proses pembelajaran akibat pandemi COVID-19 yang membutuhkan penyesuaian situasi.

Tahun 2021

Pada tahun 2021, alokasi anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 101.870.952.000, atau menurun sekitar 59,1% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan program Belajar Dari Rumah (BDR) di pindahkan ke Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM).

Tahun 2022

Tren penurunan terus berlanjut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.286.939.000, yang berarti ada penurunan sekitar 44,8% dari anggaran tahun 2021. Penurunan ini disebabkan penyesuaian Program Prioritas kampanye penguatan karakter, Penurunan menunjukkan tahap fokus penganggaran yang spesifik dan efisien.

Tahun 2023

Tahun 2023 adanya peningkatan anggaran menjadi Rp. 64.689.968.000, atau naik sekitar 14,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan Pusat Penguatan Karakter mendapatkan mandat dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pencegahan 3 Dosa Pendidikan yaitu, Pencegahan Perundungan, Pencegahan Intoleransi dan Pencegahan

kekerasan Seksual serta penguatan Inklusivitas dan Kebinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan dari jenjang Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, proses ini mencerminkan penguatan kembali pada beberapa program prioritas setelah penyesuaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2024

Pada tahun 2024, anggaran kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 67.876.276.000, atau naik sekitar 4,9% dari tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kesinambungan dalam penguatan program Prioritas yang dilaksanakan, dengan fokus pada keberlanjutan implementasi Pencegahan 3 Dosa Pendidikan.

Secara keseluruhan, tren alokasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola penurunan tajam pada dua tahun pertama, diikuti oleh stabilisasi dengan peningkatan bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Tren ini mencerminkan Puspeka melakukan efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap dinamika prioritas program.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut

Kode	Sasaran Kegiatan	Volume/ Target	Satuan	Alokasi
01	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan			
01.QMB	Komunikasi Publik			Rp. 56.931.789.000
01.QMB.004	Layanan Penguatan Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila	6	Layanan	Rp. 16.242.759.000
01.QMB.004.051	Penyusunan Kebijakan Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila			Rp. 2.241.266.000
01.QMB.004.052	Pelaksanaan Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila			Rp. 13.261.532.000
01.QMB.004.053	Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila			Rp. 739.961.000
01.QMB.005	Layanan Penguatan Karakter Terkait iklim keamanan satuan pendidikan	3	Layanan	Rp. 31.692.387.000
01.QMB.005.051	Penyusunan Kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan			Rp. 2.777.400.000
01.QMB.005.052	Pelaksanaan Kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan			Rp. 28.486.712.000
01.QMB.005.053	Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan peningkatan iklim			Rp. 428.275.000

Kode	Sasaran Kegiatan	Volume/ Target	Satuan	Alokasi
	keamanan satuan pendidikan			
01.QMB.006	Layanan Penguatan Karakter Terkait inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan	2	Layanan	Rp. 8.996.643.000
01.QMB.006.051	Penyusunan Kebijakan peningkatan inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan			Rp. 919.645.000
01.QMB.006.052	Pelaksanaan Kebijakan peningkatan inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan			Rp. 7.276.902.000
01.QMB.006.053	Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan peningkatan inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan			Rp. 800.096.000

Kode	Sasaran Kegiatan	Volume/ Target	Satuan	Alokasi
02	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter			Rp. 10.684.335.000
02.EBA.962.	Layanan Umum	1	Layanan	Rp. 1.006.882.000
02.EBA.962.051	Perencanaan dan Penganggaran Internal Satker			Rp. 155.908.000
02.EBA.962.052	Umum dan Rumah Tangga Satker			Rp. 144.490.000
02.EBA.962.053	SDM satker			Rp. 261.946.000
02.EBA.962.054	Monitoring dan Evaluasi Internal Satker			Rp. 146.838.000
02.EBA.962.055	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal Satker			Rp. 297.700.000
02.EBA.956	Layanan BMN	1		Rp. 10.000.000
02.EBA.956.051	Pengelolaan Barang Milik Negara			Rp. 10.000.000
02.EBA.994	Layanan Perkantoran	1		Rp. 9.564.831.000
02.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan			Rp. 4.332.558.000
02.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Rp. 5.232.243.000
02.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1		Rp. 102.622.000
02.EBB.951.995	Pengadaan Perangkat Pengolah Data			Rp. 61.450.000

Kode	Sasaran Kegiatan	Volume/ Target	Satuan	Alokasi
	dan Komunikasi			
02.EBB.951.996	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			Rp. 41.172.000

Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja pada Pusat Penguatan Karakter pada tahun 2024:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2024
Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota	548
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota	548
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota	548
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter ekosistem pendidikan	Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota	548
Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	Nilai	96,91

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Puspeka menetapkan 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Uraian	Target	Capaian	%
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan	548	548	100%
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	548	548	100%
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem Pendidikan	548	548	100%
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	548	548	100%
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	548	548	100%
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter			
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A	AA	100,05%
IKK 2.2	2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	96,91	98,90	102,05%

Hasil analisis dan uraian singkat terkait seluruh IKK tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1

Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan

Pada tahun 2024, Pusat Penguatan Karakter memiliki 2 sasaran dengan 6 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja di tahun 2024. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ditentukan oleh keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan di dalamnya. Hal ini ditandai dengan menguatnya pendidikan karakter pada peserta didik, diantaranya dalam hal pengimplementasian materi Profil Pelajar Pancasila, penuntasan 3 dosa besar pendidikan yakni

kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta penguatan inklusivitas dan kebinekaan. Berikut penjelasan masing-masing Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem Pendidikan

Profil Pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat diraih oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Materi Profil Pelajar Pancasila diproduksi oleh Pusat Penguatan Karakter dan disebarluaskan ke seluruh provinsi melalui diskusi kelompok terpusat (DKT), sosialisasi materi buku saku dan buku panduan Profil Pelajar Pancasila untuk orang tua peserta didik, melakukan advokasi penguatan karakter kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, melakukan aktivasi penguatan karakter, bekerja sama dengan komunitas masyarakat sipil dan satuan pendidikan, dan menyebarluaskan materi melalui media sosial dan laman Puspeka. Puspeka juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur sudah sejauh mana implementasi dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada penerapan materi Profil Pelajar Pancasila.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila. Tipe perhitungan dari IKK ini adalah kumulatif, dengan sumber data dari Laporan Pusat Penguatan Karakter dan Laporan Provinsi, kabupaten/kota.

Sebaran materi penguatan karakter terkait profil pelajar Pancasila telah mencapai target dari 548 provinsi dan kabupaten/kota.

Tabel Definisi Operasional IKK 1.1

Satuan	Provinsi dan Kab/Kota
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	PUSPEKA
Sumber Data	Laporan PUSPEKA, Laporan Provinsi dan kab/kota
Polarisasi Indikator	Stabilize
Sumber Data	Triwulan

Atas ketercapaian dari program ini dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, seperti : kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, kolaborasi yang baik dengan komunitas pendidikan, sinergi positif antara pimpinan dan pelaksana program, dan suport sistem yang baik dari internal Puspeka. Satu hal yang tidak kalah penting juga yaitu adanya arahan dan bimbingan dari pimpinan (Kepala Pusat) yang solutif dan terarah serta terbuka dalam menerima ide dan masukan.

Pada tahun 2024, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan materi terkait Profil Pelajar Pancasila sebanyak 140 daerah (100% dari target tahun 2024). Ketercapaian ini diperoleh karena adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, seperti kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, kolaborasi dengan komunitas pendidikan, sinergi positif antara pimpinan dan pelaksana program, dan dukungan positif dari internal Puspeka. Kolaborasi ini mempercepat proses distribusi dan memastikan penerimaan materi di tingkat lokal. Materi yang dikembangkan menitikberatkan pada pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai Pancasila dengan format yang mudah dipahami, menarik, dan relevan dengan kehidupan anak-anak, sehingga lebih efektif diterima. Ketercapaian IKK 1.1 diperoleh juga karena dukungan dan pimpinan dari kepala pusat yang selalu memberikan ide solutif dan selalu terbuka dalam menerima masukan. Jika dikalkulasi dari tahun 2022 s.d. tahun 2024, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan materi terkait Profil Pelajar Pancasila adalah 548 daerah sesuai dengan yang ditargetkan dalam Renstra Puspeka.

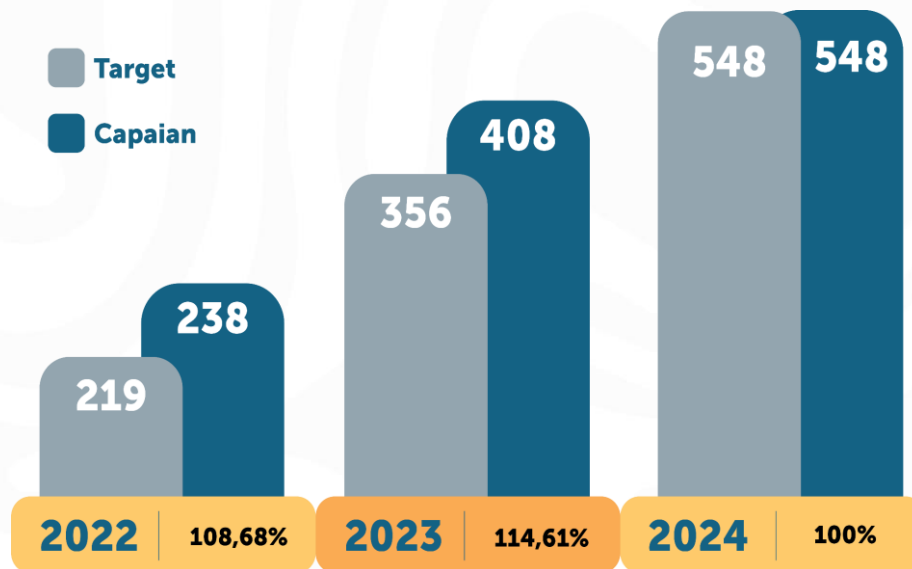


Diagram capaian indikator

Berikut rincian provinsi yang telah mendapatkan materi Profil Pelajar Pancasila selama tahun 2024:

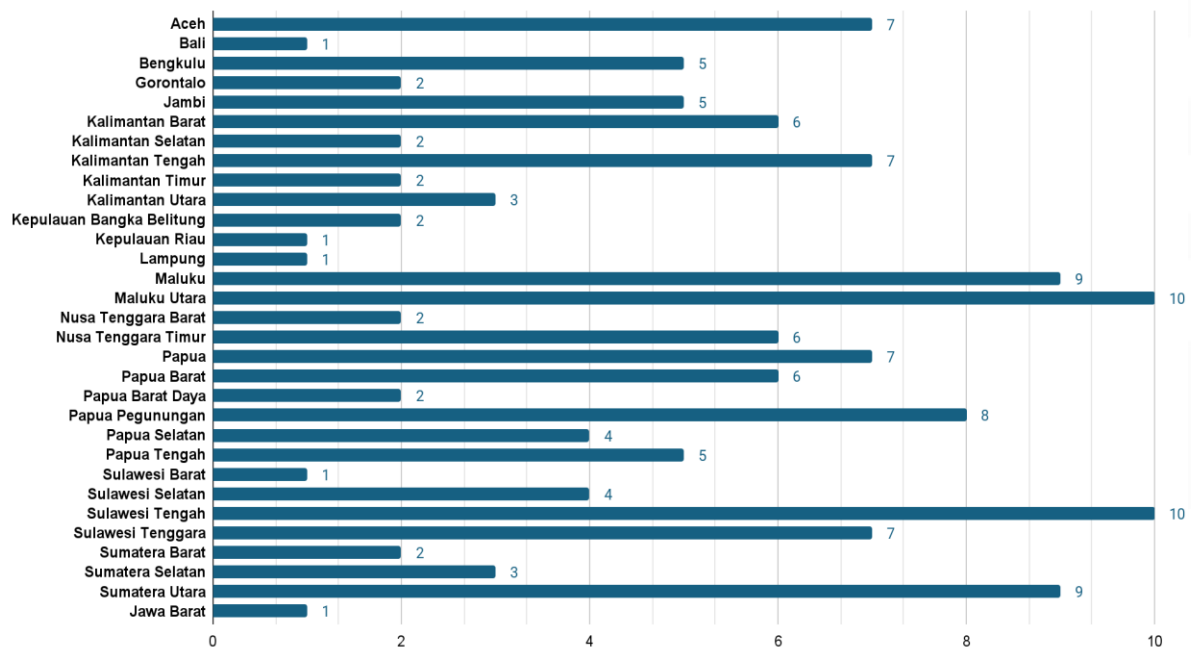


Diagram capaian sebaran provinsi dan kabupaten/kota IKK 1.1 tahun 2024

Program yang mendukung pada capaian Indikator Kinerja Kegiatan berikut antara lain:

1. Menyampaikan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dilanjutkan dengan advokasi dan pendampingan untuk pengisian instrumen pengukuran capaian implementasi penguatan karakter terhadap substansi Profil Pelajar Pancasila;



DKT Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan

2. Diseminasi dan Sosialisasi Buku Pendamping Profil Pelajar Pancasila bagi Orang Tua jenjang SD mengundang tenaga pendidik, orang tua, komunitas dan Dinas Pendidikan Kota atau Provinsi dengan penulis buku sebagai narasumber dan pendampingan peserta dalam pengisian tindak lanjut untuk menyebarluaskan Buku Pendamping Profil Pelajar Pancasila bagi Orang Tua jenjang SD;



Gambar Diseminasi Buku Pendamping Profil Pelajar Pancasila di Ekosistem Pendidikan



Gambar Penyebarluasan Buku Saku Profil Pelajar Pancasila di Ekosistem Pendidikan

3. Diseminasi Buku Saku Profil Pelajar Pancasila, selain menyebarluaskan Buku Pendamping Profil Pelajar Pancasila, Pusat Penguatan Karakter juga melakukan penyebaran Buku Saku Profil Pelajar Pancasila dengan mengundang tenaga pendidik, orang tua, komunitas, dan Dinas Pendidikan Kota atau Provinsi, para

peserta kemudian mengisi rencana tindak lanjut untuk menyebarluaskan buku tersebut kepada Masyarakat;

4. Aktivasi Produksi Buku Sehari Satu Dongeng Profil Pelajar Pancasila, merupakan Buku Dongeng yang terdiri dari 30 karya naskah dongeng pemenang Kreasi Karya Naskah Dongeng Profil Pelajar Pancasila. Adanya buku dongeng ini, diharapkan mampu menjadi media penyebarluasan penguatan karakter sesuai dimensi Profil Pelajar Pancasila kepada masyarakat khususnya anak-anak dengan menyenangkan;



Gambar Produk Buku Kumpulan Dongeng Profil Pelajar Pancasila “Sehari Satu Dongeng”

5. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di 3 pilot project (Aceh Besar, Gayo Lues, Bireuen), merupakan penyebarluasan nilai-nilai dari dimensi Profil Pelajar Pancasila sebagai pencegahan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;



Gambar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika



169 9 13
Disukai oleh amaliarisdahdyh dan lainnya
cerdasberkarakter.kemdikdasmen #SahabatKarakter,
Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Jauhi

6. Produksi konten pencegahan penyalahgunaan narkoba berupa video pendek, poster, dan puisi yang dipublikasikan melalui media sosial Pusat Penguatan Karakter. Produksi konten ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba;

konten pencegahan penyalahgunaan narkoba

7. Produksi konten pencegahan judi online bagi pelajar berupa film pendek yang berjudul “Kemenangan Sejati” bertujuan sebagai media sosialisasi terkait ancaman bahaya judi online serta menguatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dan terjerat judi online;



Proses syuting film “Kemenangan Sejati”

8. Aktivasi pencegahan judi online melalui Film pendek yang berjudul “Kemenangan Sejati” yang diluncurkan dalam kegiatan nonton bareng (nobar) di CGV Cinemas, fX Sudirman. Pada kegiatan ini selain nonton bareng juga disertai dengan gelar wicara seputar film pendek “Kemenangan Sejati” bersama sutradara dan para pemeran film, dan juga seputar pencegahan judi online bersama psikolog dan penyintas judi online;

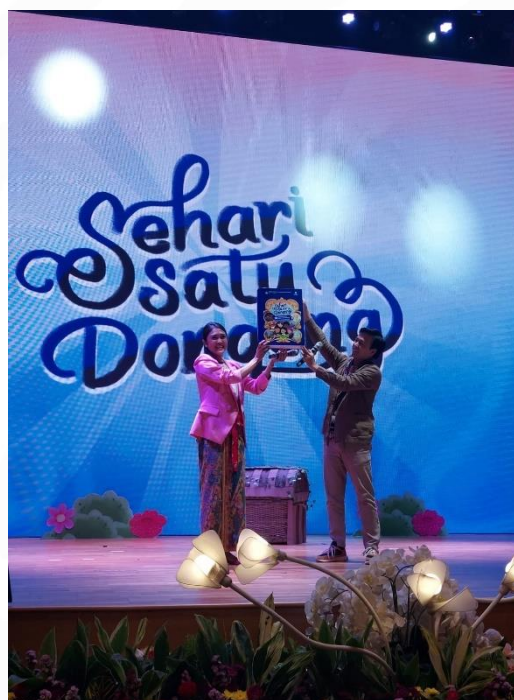


Gelar Wicara dan Peluncuran Film Pendek Pencegahan judi Online “Kemenangan Sejati” bersama dengan narasumber, sutradara, pemain film dan penyintas



Foto bersama dengan Pak Menteri dan jajaran pimpinan Kemendikbudristek saat Gelar Wicara dan Peluncuran Film Pendek Pencegahan judi Online “Kemenangan Sejati”

9. Hari Anak Nasional Spesial Dongeng Profil Pelajar Pancasila merupakan acara dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2024 melalui pertunjukan dongeng dalam Buku “Sehari Satu Dongeng”. Acara ini melibatkan komunitas dongeng dan mengundang pelajar serta guru jenjang PAUD dan SD di Kota Jakarta;



Peluncuran Buku “Sehari Satu Dongeng



Peluncuran Buku Dongeng sekaligus memperingati Hari Anak Nasional dengan Penampilan Dongeng Profil Pelajar

10. Safari Profil Pelajar Pancasila ke berbagai satuan pendidikan jenjang SD di beberapa provinsi di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di 25 titik di 25 provinsi di Indonesia. Pusat Penguatan Karakter bekerjasama dengan Komunitas Kampung Dongeng yang tersebar di 25 provinsi tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membumikan nilai-nilai karakter terutama nilai kejujuran melalui film dengan sasaran peserta didik jenjang SD;



Gambar Pendampingan Pemutaran Film Pendek “Benih Kejujuran”

11. Aktivasi konten serta peluncuran album lagu Tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat yaitu peluncuran Album yang terdiri dari 8 Lagu tentang Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang merupakan karya dari pemenang I Kreasi Cipta Lagu Anak Nusantara Melalui peluncuran album ini, diharapkan dapat menyebarkan penguatan karakter yaitu Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat lebih luas dan menarik untuk diterima oleh Masyarakat;



Penampilan Lagu Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat



Penyerahan Plakat secara Simbolis kepada para Pemenang Kreasi Cipta Lagu Anak Nusantara oleh Pak Menteri

Analisis Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan yang telah dicapai pada kegiatan yang dilaksanakan Pusat Penguatan Karakter:

1. Buku panduan dan buku saku Profil Pelajar Pancasila yang telah disosialisasikan dimanfaatkan oleh orang tua siswa jenjang SD dan masyarakat umum untuk diterapkan dalam mendukung pembelajaran. Rata-rata peningkatan pemahaman para peserta terkait Profil Pelajar Pancasila sebesar 9,06 poin setelah mengikuti sosialisasi. Beberapa satuan pendidikan juga telah melakukan tindak lanjut dengan mendiseminasikan buku kepada warga ekosistem pendidikan lainnya;
2. Konten yang disediakan oleh Puspeka banyak digunakan sebagai bahan ajar, baik di lingkungan sekolah maupun ekosistem pendidikan lainnya. Hingga November 2024, jumlah unduhan pada konten Profil Pelajar Pancasila mencapai 44.616 unduhan, yang meliputi buku panduan penguatan karakter untuk orang tua jenjang PAUD dan SD, buku saku Profil Pelajar Pancasila, dan buku kumpulan dongeng Profil Pelajar Pancasila;
3. Banyak pengguna media sosial yang mengakses konten terkait Profil Pelajar Pancasila, menunjukkan minat dan partisipasi yang tinggi;
4. Pelaksanaan aktivasi penguatan karakter yang diperuntukkan bagi ekosistem pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan terkait Profil Pelajar Pancasila;
5. Dimanfaatkannya album lagu 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat baik oleh pendidik, peserta didik, keluarga maupun masyarakat sebagai salah satu bahan belajar di lingkungannya. Sampai akhir tahun 2024, lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat telah

ditonton sebanyak 675 ribu kali;

6. Adanya tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama antara Puspeka dengan 3 (tiga) kabupaten di Aceh yaitu Bireuen, Aceh Besar dan Gayo Lues dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan penyebaran narkotika;
7. Adanya pelibatan masyarakat (komunitas) dalam setiap kegiatan.

Kendala/Permasalahan

4. Belum semua daerah dapat mendiseminasikan materi terkait Profil Pelajar Pancasila kepada satuan pendidikan di wilayahnya, khususnya untuk satuan pendidikan yang sulit untuk diakses secara luring, maupun yang memiliki keterbatasan akses internet;
5. Belum tersedianya Buku Profil Pelajar Pancasila untuk orang tua jenjang SMP, SMA/SMK, hingga Perguruan Tinggi, sehingga implementasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila pada jenjang pendidikan tersebut belum maksimal;
6. Masih terbatasnya cakupan program yang dijalankan, serta kurangnya integrasi dan kolaborasi antarprogram, serta minimnya variasi dan diversifikasi konten yang tersedia untuk memperkuat penyebaran nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila.

Langkah Antisipasi dan Strategis

1. Bekerjasama dengan komunitas atau Jaringan Masyarakat Sipil yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk membantu menyebarkan materi penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila;
2. Penyusunan Buku Profil Pelajar Pancasila dilaksanakan untuk jenjang SMP, SMA/SMK, hingga Perguruan Tinggi, diharapkan Puspeka dapat meningkatkan pemahaman Profil Pelajar Pancasila secara berkelanjutan dan menyeluruh pada seluruh satuan Pendidikan;
3. Menjalankan program integrasi dan kolaborasi, program berbasis teknologi dan media baru, serta peningkatan dan diversifikasi konten. Dengan melaksanakan program ini, Puspeka dapat terus memperluas jangkauan dan dampak dari upaya penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila, serta memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dipahami dengan baik oleh kalangan millennial dan Masyarakat luas.
4. Melakukan pendampingan kepada peserta diseminasi Pemanfaatan Buku Profil Pelajar Pancasila secara daring dalam penyebaran, sehingga buku tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menghasilkan konten-konten penguatan karakter melalui pelibatan dalam mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh Puspeka.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan

Iklim keamanan di lingkungan Pendidikan adalah kondisi yang memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis. Aspek keamanan fisik, yang mencakup aturan dan fasilitas yang berkaitan dengan keselamatan warga satuan pendidikan. Aspek sosial-emosional, yang melibatkan sikap peserta didik dan pendidik terkait kekerasan dan keterampilan untuk mengatasi masalah tersebut. Iklim pendidikan yang kondusif dapat berpengaruh positif terhadap pembelajaran dan capaian belajar peserta didik.

Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan penting untuk dilakukan lebih serius dan tegas mengingat semakin tingginya insiden kekerasan di lingkungan pendidikan yang mengancam para peserta didik dan warga satuan pendidikan atau perguruan tinggi. Pada Merdeka Belajar Episode 25 tahun 2023, Kemendikbudristek telah meluncurkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tujuan Permendikbudristek ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua, sehingga perlu untuk memberikan informasi kepada para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat terkait tindakan kekerasan dan dapat menjadi pemantik untuk mengimplementasikan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dalam lingkungan mereka masing-masing. Pencegahan dan penanganan kekerasan adalah aspek terpenting untuk mengurangi terjadinya kekerasan di satuan pendidikan. Lebih lanjut pada jenjang Perguruan Tinggi, Kemendikbudristek meluncurkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT). Permendikbudristek PPKPT hadir untuk menjamin keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bebas dari segala bentuk kekerasan, inklusif, dan berkebinekaan. Permendikbudristek ini merupakan perluasan kebijakan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek PPKS). Dengan diterbitkannya Permendikbudristek PPKPT pada 14 Oktober 2024, diharapkan dapat memperkuat kinerja satuan tugas di perguruan tinggi sekaligus memberikan kepastian prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Selain berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan baik di lingkungan satuan pendidikan maupun perguruan tinggi, Puspeka juga mendapat amanah untuk menuntaskan 3 dosa besar pendidikan yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Beberapa program yang telah dilakukan oleh Puspeka antara lain program pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, program pencegahan perundungan melalui bimtek/peningkatan kapasitas kepada fasilitator guru dan agen perubahan pada satuan pendidikan yang berpotensi rawan terjadi perilaku perundungan, dan menuntaskan intoleransi dengan menyosialisasikan materi produk kebinekaan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Tipe perhitungan ini dari IKK ini adalah kumulatif, dengan sumber data yang diperoleh berdasarkan dari laporan Puspeka dan laporan dari provinsi dan kabupaten/kota.

Satuan	Provinsi & Kab/kota
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Puspeka
Sumber Data	Laporan Puspeka, Laporan provinsi & kabupaten/kota
Polarisasi Indikator	Stabilize
Sumber Data	Triwulan

Tabel definisi operasional IKK 1.2

Pada tahun 2024, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sebanyak 153 daerah (100% dari target tahun 2024). Materi-materi disampaikan secara langsung melalui diskusi kelompok terpumpun, peningkatan kapasitas, sosialisasi, diseminasi, serta advokasi. Selain itu, materi pencegahan kekerasan juga disampaikan melalui media sosial dan laman Pusat Penguatan Karakter. Sejak tahun 2022 s.d. 2024, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan materi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi mencapai 548 daerah sesuai dengan yang ditargetkan dalam Renstra Puspeka. Ketercapaian IKK 1.2 diperoleh karena baik satuan pendidikan maupun perguruan tinggi yang telah mendapatkan materi telah memahami secara mendalam materi dan regulasi yang telah disosialisasikan selama kegiatan peningkatan kapasitas dan diseminasi.

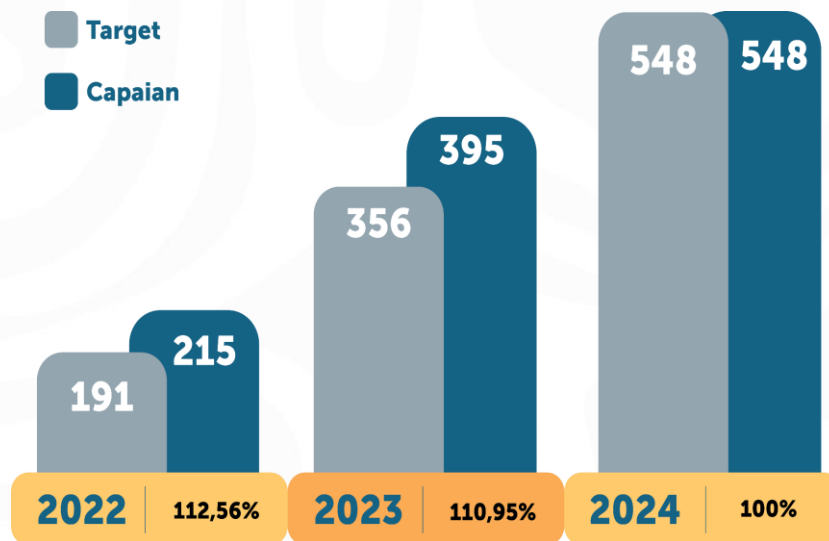


Diagram capaian IKK 1.2

Berikut rincian provinsi yang telah mendapatkan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi selama tahun 2024:

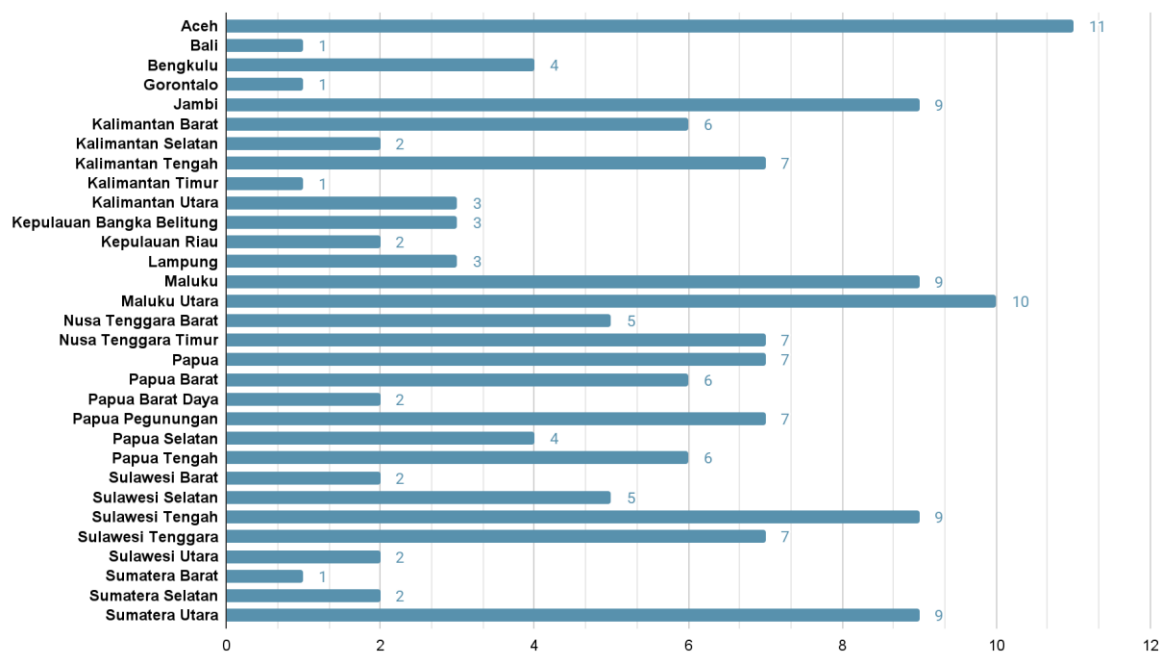


Diagram capaian provinsi dan kabupaten/kota IKK 1.2 tahun 2024

Program yang mendukung ketercapaian Indikator pada pencegahan dan penanganan kekerasan

di lingkungan pendidikan antara lain:

1. Menyampaikan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dilanjutkan dengan advokasi dan pendampingan untuk pengisian instrumen pengukuran capaian implementasi penguatan karakter terhadap substansi pencegahan kekerasan.



Gambar DKT Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan

2. Akselerasi pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPK) dan Satgas Pemerintah Daerah
3. Peningkatan Kapasitas Program Pencegahan Perundungan (*Roots*) Jenjang SMP, SMA, & SMK

Program Roots telah terlaksana sejak tahun 2021, sebanyak 10.606 sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas Program Roots Indonesia. Pada sekolah yang telah diintervensi tersebut, Program Roots telah dilaksanakan sebanyak 8.662 kali dan menghasilkan +/- 173.240 siswa agen perubahan. Beberapa sekolah melaksanakan Program Roots lebih dari satu kali, di mana 2.569 sekolah telah melaksanakan sebanyak 2 kali, 799 sekolah sebanyak 3 kali, dan 169 sekolah sebanyak 4 kali.

Pada tahun 2024, Puspeka telah mengintervensi 382 sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK secara luring di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Maluku, Jawa Timur dan Maluku Utara, Adapun

pelaksanaan melalui kolaborasi dengan BPMP Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Dinas Pendidikan Kota Bali. Untuk Sasaran sekolah yang diintervensi berdasarkan hasil asesmen tahun 2023. Kegiatan peningkatan kapasitas bagi fasilitator guru dilaksanakan secara luring dan daring, serta penyelenggaraannya dilakukan melalui kolaborasi dengan UPT Kemendikbudristek (BPMP Provinsi Sumatera Selatan), Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kota Manado dan Dinas Pendidikan Kota Denpasar.



Gambar Peningkatan Kapasitas Fasilitator
Program Roots Indonesia

4. Peningkatan Kapasitas Guru Piloting Program Pencegahan Kekerasan Jenjang SD

Pada tahun 2024, Puspeka berupaya mengembangkan program pencegahan kekerasan di Sekolah Dasar. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan berdasarkan permendikbudristek No.46 tahun 2023 tentang Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Penerapan program ini dirancang dapat diterapkan melalui kegiatan ko-kurikuler atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema “Bangunlah Jiwa dan Raganya”. Modul yang dikembangkan terbagi 3 (tiga), yakni: (1) Modul Fase A Sayangi Diri dan Kenali Teman untuk Kelas 1 dan 2 SD; (2) Modul Fase B Sayangi Diri dan Sayangi Teman untuk Kelas 3 dan 4 SD; (3) Modul Fase C Sekolahku Aman dan Menggembirakan untuk Kelas 5 dan 6 SD.

Program ini diujicobakan di 16 sekolah dasar terpilih. Pemilihan sekolah dasar dengan mempertimbangkan sejumlah hal, di antaranya lokasi, status sekolah, dan hasil asesmen nasional. Sekolah yang dipilih untuk melakukan program ini terdapat di 5 Provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara, yang berada di tujuh kabupaten/kota, meliputi Kota Jakarta, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tarakan, Kota Batu, Kab. Bogor, Kab. Bekasi, dan Kab. Bandung.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum uji coba dilakukan. Puspeka berkolaborasi dengan INOVASI (Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia)

menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi guru piloting program pencegahan kekerasan jenjang SD yang melibatkan 48 orang calon fasilitator guru. Fasilitator guru berasal dari 16 sekolah piloting yang mengirim masing-masing 3 orang (Guru kelas 1 atau 2, Guru Kelas 3 atau 4, dan Guru Kelas 5 dan 6). Khusus untuk sekolah yang berasal dari Kota Tarakan dan Kota Baku dibiayai oleh INOVASI. Setiap guru yang mendapatkan pelatihan diharapkan dapat menerapkan modul pencegahan kekerasan di sekolah dasar pada 204 rombongan belajar yang ada di sekolah piloting, yang melibatkan 5.029 peserta didik.



Peningkatan Kapasitas Guru Piloting Program Pencegahan Kekerasan

5. Digitalisasi Program Roots Indonesia “Ayo Atasi Perundungan” pada Platform Merdeka Mengajar

Pada tanggal 28 Desember 2023, Pusat Penguatan Karakter bersama UNICEF dan beberapa Fasilitator Nasional telah mengembangkan materi program roots di PMM agar dapat dipelajari semua pendidik pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Topik pelatihan mandiri ini adalah Ayo Atasi Perundungan (APP) melalui Program Roots Indonesia yang dapat diakses melalui tautan berikut <https://bit.ly/AyoAtasiPerundungan>.

Pada tahun 2024, Pelatihan Mandiri dengan topik APP ini telah dilengkapi dengan 16 video pembelajaran. Sampai dengan saat ini (1 Oktober 2024), sudah diakses **63.532** pendidik dari **25.481** sekolah.



Pelatihan Mandiri *Ayo Atasi Perundungan* melalui PMM

6. Akselerasi Pelaksanaan Modul Pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Bagi Mahasiswa dan Pembentukan Satgas PPKS Perguruan Tinggi Swasta

Modul Pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi jenjang perguruan tinggi telah disebarkan baik secara luring maupun daring. Penggunaan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) di tiap perguruan tinggi telah menjadi wadah bagi *civitas academica* termasuk mahasiswa untuk mengakses dan memenuhi literasi tentang PPKS. Puspeka juga telah menyiapkan Learning Management System (LMS) bagi para calon panitia seleksi Satgas, calon Satuan Tugas (Satgas) PPKS, dan insan perguruan tinggi. LMS digunakan sebagai salah satu syarat terbentuknya Pansel dan Satgas PPKS di perguruan tinggi.

Dalam upaya percepatan pembentukan Satgas PPKS pada perguruan tinggi swasta (PTS) telah dilakukan dengan berkoordinasi aktif antara Puspeka, LL Dikti, dan Perguruan Tinggi. Percepatan pembentukan dilakukan dengan berbagai bentuk seperti sosialisasi pembentukan Satgas PPKS di PTS, kordinasi dan komunikasi dengan LL Dikti dan Perguruan tinggi baik secara formal maupun informal, dan sesi interaktif secara daring yang disebut sebagai Bincang Pagi dan Bincang Siang PPKS.

7. Workshop Diseminasi Modul Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual Jenjang SMA dan SMK

Pada tahun 2024, Modul Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual di semua jenjang, yaitu PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK telah diimplementasikan ke satuan pendidikan. Untuk jenjang SMA dan SMK, telah dilakukan implementasi dalam bentuk *workshop* diseminasi di Provinsi Jawa Tengah. *Workshop* ini dihadiri peserta dari unsur Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Guru Bimbingan dan Konseling jenjang SMA dan SMK. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan banyak pihak. Bukan hanya disebarkan secara luring kepada peserta yang hadir, modul juga dibagikan secara daring dalam bentuk tautan dan *softfile*. Modul daring dapat diakses melalui laman



<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/konten-ppksp/> atau melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM).

Modul Pencegahan Kekerasan Seksual jenjang PAUD – SMA/SMK



Penyerahan Modul Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual

8. Advokasi Implementasi Pemanfaatan Produk Kebinekaan Bagi Pemangku Kepentingan. Produk kebinekaan yang telah di produksi Pusat Penguatan Karakter telah diadvokasi untuk di implementasikan di 9 provinsi untuk meningkatkan nilai iklim kebinekaan. Kegiatan melibatkan koordinator guru penggerak tingkat provinsi, guru penggerak tingkat kabupaten/kota, komunitas belajar, jaringan masyarakat sipil, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek di tingkat provinsi.



Advokasi Produk Kebinekaan Bagi Pemangku Kepentingan

9. Penetapan Modul Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan sebagai Penguatan Tata Kelola PPKSP.

Dengan ditetapkannya Permendikbud Ristek No. 46/2023, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud Ristek RI berupaya untuk terus menguatkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di Pemerintah Daerah. Untuk menjamin standar penanganan baik di TPPK maupun Satgas PPKSP, maka Puspeka Kemendikbud Ristek RI mengembangkan modul Penanganan Kekerasan agar dapat dijadikan acuan dalam proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan. Penyusunan Modul Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan di laksanakan melalui 4 tahapan, tahap pertama yaitu penyusunan draft Modul Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, tahap kedua review draft Modul Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, tahap ketiga finalisasi draft Modul Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan dan tahap ke empat yaitu uji keterbacaan Modul Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Penyusunan modul dan uji keterbacaan modul ini melibatkan Kementerian dan Lembaga (K/L), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud, Pemerintah Daerah dan Organisasi Mitra.

10. Peningkatan Kapasitas implementasi modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP);

Modul PPKSP yang telah selesai disusun dan diuji coba akan dilatihkan kepada tim Puspeka serta tim dari jaringan masyarakat sipil yang bergerak di bidang penanganan kekerasan untuk dipersiapkan sebagai master trainer. Master trainer ini kemudian akan memberikan pelatihan kepada calon fasilitator nasional yang berasal dari berbagai unsur, seperti BBPMP, BPMP, BBGP, BGP, BBPPMPV, BPPMPV, serta Satker utama atau direktorat teknis. Setelah terbentuknya fasilitator nasional, mereka akan melatih perwakilan peserta dari unsur Satuan Tugas Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Sekolah Penggerak. Peningkatan kapasitas ini dilaksanakan di sembilan region melalui kerja sama antara Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) dan unit utama di lingkungan Kemendikbudristek dengan menggunakan metode hybrid (daring dan luring). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan peserta memahami peran dan tanggung jawab TPPK serta satuan tugas, memiliki pemahaman yang komprehensif tentang berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di satuan pendidikan—seperti kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, hingga kebijakan yang mengandung kekerasan—serta memahami prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.



peningkatan kapasitas modul PPKSP

11. Peluncuran Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);

Peluncuran PPKPT dilakukan secara daring dan luring pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dihadiri oleh pemimpin perguruan tinggi, wakil pemimpin perguruan tinggi,

dosen, tenaga kependidikan, satuan tugas, mahasiswa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam peluncuran tersebut, disampaikan substansi terkait Permendikbudristek PPKPT oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Selain itu, disosialisasikan pula terkait laman PPKPT yang berisi tentang materi/konten/informasi terkait PPKPT untuk semua pemangku kepentingan terkait.

12. Sosialisasi Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;

Sosialisasi portal pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dilakukan secara luring dan daring setelah diluncurkannya Permendikbudristek PPKPT. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus pemahaman terkait proses rekrutmen calon Satuan Tugas PPKPT, baik kepada LLDIKTI maupun perguruan tinggi.

13. Aktivasi Konten praktik baik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

14. Aktivasi Gelar Wicara “Ruang Bincang Karakter” dengan tema pentingnya pendidikan karakter dan lingkungan sekolah yang aman dalam rangka Hari Pahlawan.

Sebagai penguatan, perluasan, dan pemberian informasi kepada masyarakat umum, Puspeka melakukan produksi dengan konsep *talkshow* yang dikemas secara ringan. *Talkshow* ini menggunakan latar ruangan Bimbingan Konseling Modern dengan *Host* yang memandu berperan (persona) sebagai guru BK dan Co-host sebagai guru BK.





Ruang Bincang Karakter Spesial Hari Pahlawan: Semangat untuk Pendidikan Berkelanjutan

15. Aktivasi Gelar Wicara “Berteman Tanpa Kekerasan” dalam rangka PUSAKA 2024

Dalam rangkaian Pekan Untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) 2024, dilaksanakan Gelar Wicara dengan tema “Berteman Tanpa Kekerasan”. Pada sesi ini mengundang narasumber Co-Founder/Plt. Direktur Eksekutif Yayasan Pulih dan siswa peserta Tunas Bineka. Pembahasan terkait bagaimana cara menciptakan lingkungan pertemanan yang positif dengan saling mengenal dan menghindari terjadinya kekerasan.





Talkshow “Berteman tanpa Kekerasan” pada acara Pekan Untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) 2024

Analisa Keberhasilan

Salah satu faktor keberhasilan dalam menyebarkan materi untuk penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi adalah upaya masif yang dilakukan oleh Puspeka mendorong pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas dan satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Data pada Desember 2024 menunjukkan, 71,05% provinsi dan 86,38% kabupaten/kota telah membentuk satgas, dan 93,83% satuan pendidikan telah membentuk TPPK.

Jumlah satuan Pendidikan	439.602
Satuan Pendidikan Update	433.493
TPPK	406.759
Persentase TPPK	93,83%

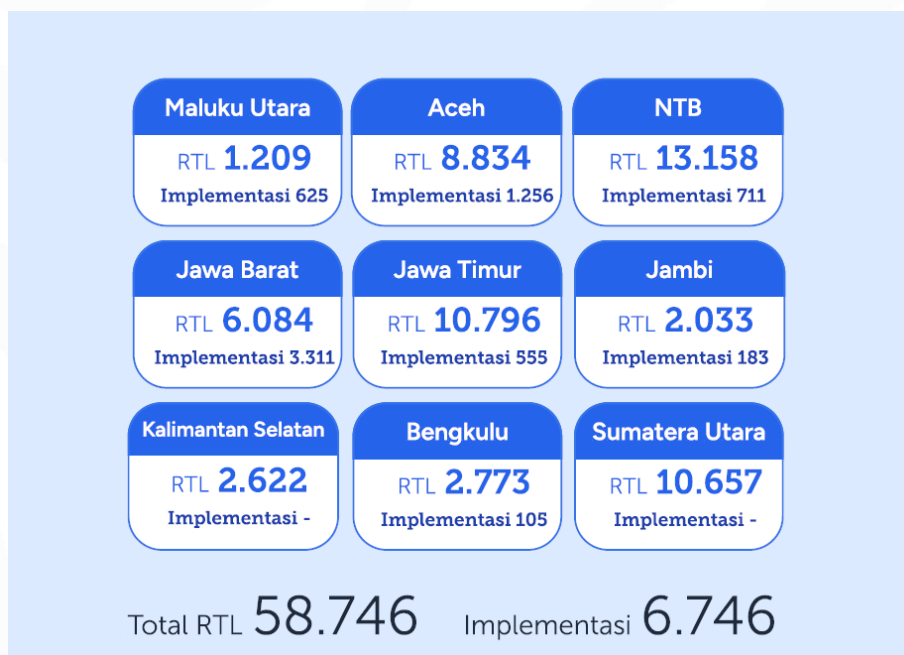
Persentase satgas provinsi	71,05%
Jumlah Provinsi	38
Jumlah satgas provinsi	27

Persentase satgas kab/kota	86,38%
Jumlah kabupaten/kota	514
Jumlah satgas kab/kota	444

Capaian pembentukan TPPK dan satgas Tingkat pemerintah daerah

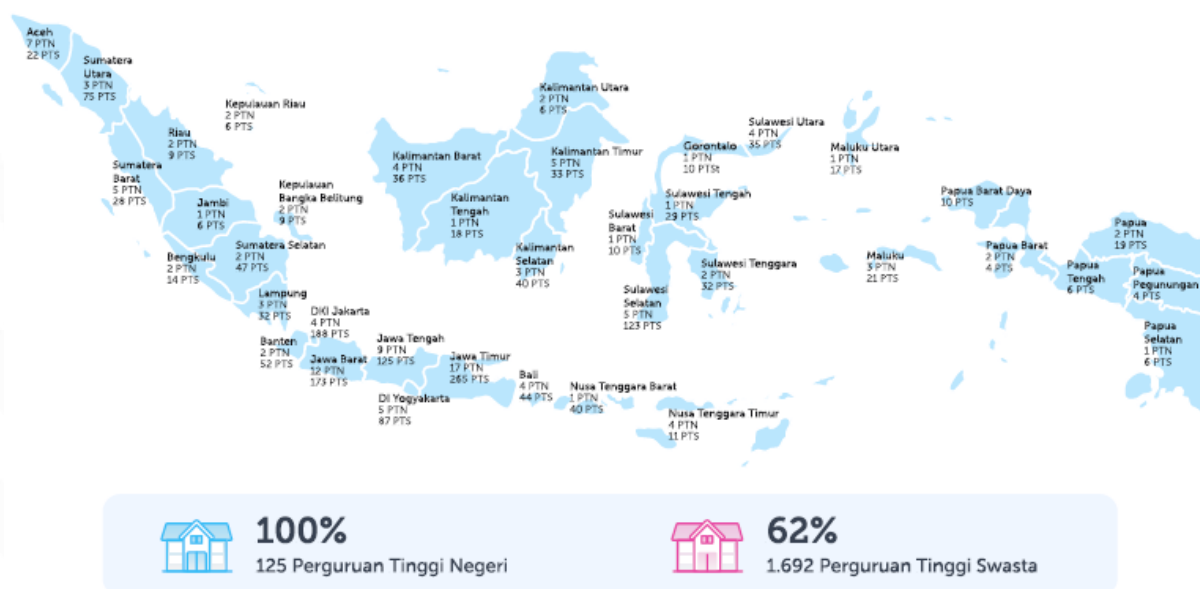
Selain melalui Satgas dan TPPK, materi penuntasan perundungan disampaikan melalui Peningkatan Kapasitas Program Pencegahan Perundungan (Program Roots Indonesia). Hingga tahun 2024, sebanyak 10.606 sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMP telah mengikuti bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas Program Roots Indonesia. Pada sekolah yang telah diintervensi tersebut, Program Roots telah dilaksanakan sebanyak 8.662 kali dan menghasilkan ± 173.240 siswa agen perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi Program Roots, sebanyak 74,97% warga sekolah menjadi lebih paham terkait perundungan dan jenis-jenisnya karena telah mendapatkan materi saat peningkatan kapasitas.

Pada tahun 2024, Puspeka berkomitmen untuk melanjutkan kampanye nilai kebinekaan melalui serangkaian proses pendampingan, advokasi, dan kolaborasi. Advokasi Implementasi Pemanfaatan Produk Kebinekaan bagi pemangku kepentingan dilaksanakan pada 9 provinsi dan telah didiseminasikan kepada 6.746 peserta.



Capaian Data implementasi Pemanfaatan Produk Kebinekaan bagi Pemangku Kepentingan

Penyebarluasan materi tidak hanya dilakukan pada satuan pendidikan, tetapi juga pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Tahun 2024, Pusat Penguatan Karakter berfokus untuk menyosialisasikan pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Swasta, yang saat ini mencapai 62% atau sudah 1.692 dari 2.730 Perguruan Tinggi Swasta yang membentuk satuan tugas PPKS.



Sebaran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Beberapa faktor lain yang mendukung keberhasilan pada pencapaian target Indikator Kinerja antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi dan materi terkait pencegahan serta penanganan kekerasan seksual;
2. Pengembangan Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) sebagai pengganti Portal PPKS yang sebelumnya digunakan oleh admin perguruan tinggi, pada Portal PPKPT dibuat khusus untuk admin LLDIKTI dapat mengakses dan menggunakannya;
3. Pengembangan Laman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) sebagai sarana penyampaian materi/informasi terkait PPKPT;
4. Mengintensifkan komunikasi agar memastikan perwakilan sekolah dapat hadir sesuai dengan agenda yang direncanakan;
5. Sosialisasikan Produk Kebinekaan melibatkan komunitas belajar dan jaringan masyarakat sipil sehingga menjangkau sasaran yang lebih luas, setelah sosialisasi tahun sebelumnya, yang melibatkan kepala sekolah/pengawas;
6. Mengembangkan produk PPKSP berupa Modul Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
7. Menyiapkan fasilitator daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan di wilayah kerja satgas dan TPPK.

Kendala/Permasalahan

1. Beberapa satuan Pendidikan belum membentuk TPPK dan pemerintah daerah yang belum membentuk Satgas karena lokasi satuan pendidikan yang terpencil dan sulit dijangkau oleh Dinas/UPT;
2. Secara umum pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang tercantum pada Permendikbudristek 46/2023 belum mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pelatihan kepada anggota TPPK di satuan pendidikan dan Satgas di tingkat pemda baik pada aspek pencegahan maupun penanganan;
3. Program pencegahan perundungan merupakan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga sekolah perlu menetapkan kebijakan mengenai rencana program roots di masing-masing sekolah terutama terkait pembiayaan, sumber daya manusia yang terlibat, dan waktu pelaksanaan;
4. Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Puspeka tidak dapat menjangkau semua daerah secara luring, sehingga sebagian besar dilakukan melalui daring yang seringkali mengalami kendala jaringan;
5. Karena sosialisasi modul pencegahan kekerasan jenjang SD masih bersifat piloting, belum semua daerah menjadi sasaran sosialisasi modul tersebut;
6. Terbatasnya saluran komunikasi yang efektif untuk menjangkau seluruh pemangku kepentingan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil;
7. Belum semua kabupaten/kota sasaran mengimplementasikan rencana tindak lanjut pemanfaatan produk kebinekaan;
8. Pemerintah daerah dan satuan tugas belum memahami bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan adalah tugas bersama, bukan hanya tugas TPPK dan Satgas. Selain itu Satgas dan TPPK tidak hanya melakukan penanganan kasus, tetapi juga upaya pencegahan kekerasan di satuan Pendidikan;
9. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi masih bersifat umum, belum disusun petunjuk teknis implementasi kebijakan.

Langkah Antisipasi dan Strategis

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan:

1. Melakukan pendampingan akselerasi pembentukan TPPK dan Satgas provinsi dan kabupaten/kota;
2. Berkolaborasi dengan Kemendagri dan memberikan penjelasan kepada daerah melalui surat edaran terkait peran satuan pendidikan, pemerintah daerah dan kementerian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan baik pada lingkup tata kelola, edukasi maupun penyiapan sarana prasarana;
3. Modul pencegahan perundungan di satuan Pendidikan (Program Roots Indonesia) dapat

dikembangkan dalam bentuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sehingga dapat terintegrasi dalam Kurikulum Merdeka;

4. Setiap Dinas Pendidikan dapat mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan Program Roots Indonesia berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Jaringan Masyarakat Sipil untuk memperbanyak sasaran sekolah yang melaksanakan program pencegahan perundungan pada satuan pendidikan yang belum terjangkau;
5. Mendorong guru piloting untuk berbagi pengalaman dan praktik baik melalui forum diskusi atau webinar yang melibatkan guru-guru dari wilayah lain;
6. Membuat saluran/grup untuk membagikan modul pembelajaran dalam format digital (PDF atau e-book) selain menyebarkan melalui website Cerdas Berkarakter supaya dapat diakses oleh siswa maupun masyarakat;
7. Melakukan pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut bimtek pemanfaatan kebinekaan;
8. Menyusun panduan ringkas yang menjelaskan pembagian peran antara TPPK dan seluruh tenaga pendidik dalam satuan Pendidikan serta mengkampanyekan tugas dan fungsi TPPK dan Satgas pada media sosial dan laman cerdas berkarakter;
9. Berkolaborasi dengan K/L terkait, penyedia layanan, jaringan masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bebas dari kekerasan, inklusif, aman, dan nyaman.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.3

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem Pendidikan (Tim inklusivitas dan tim Intoleransi/bineka)

Inklusivitas dalam dunia pendidikan merupakan upaya membangun lingkungan pendidikan yang adil dan setara bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, status sosial, dan lain sebagainya. Pendidikan inklusif berusaha untuk memastikan bahwa setiap siswa, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak, mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan yang ada. Lingkungan sekolah perlu merangkul perbedaan dan menyediakan fasilitas yang mengakomodasi beragam disabilitas, kecerdasan, dan bakat agar semua murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.



Namun yang terjadi di lapangan, masih banyak daerah yang belum mampu mewujudkan iklim inklusivitas di wilayah kewenangannya, termasuk dalam memperkuat toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak yang tidak pernah bersekolah mencapai 20,51%, sementara penyandang disabilitas yang mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi hanya 3,38%. Lebih jauh, Komnas Perempuan mencatat bahwa indeks inklusivitas Indonesia terbilang rendah pada jenjang dunia maupun kawasan ASEAN. Indeks inklusivitas adalah ukuran holistik dari pembangunan inklusif yang berfokus pada kesetaraan ras, etnik, gender, agama dan disabilitas sebagai representasi politik, kekerasan di luar kelompok, ketimpangan pendapatan, tingkat penahanan serta kebijakan migrasi atau pengungsi.

Melihat realita tersebut, sudah sepatutnya pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan pendidikan yang inklusif agar membentuk sikap saling menghargai dan memahami sesama individu, menciptakan komunitas yang lebih harmonis dan mendukung keberagaman. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan empati yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Agar semakin banyak daerah dan masyarakat yang memahami pentingnya penerapan pendidikan yang inklusif, Puspeka memproduksi berbagai produk penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebinekaan yang disebarluaskan melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun, sosialisasi dan diseminasi buku inklusivitas dan kesetaraan gender, aktivasi dan advokasi, serta berkolaborasi dengan berbagai komunitas.

Metode perhitungan capaian IKK diperoleh dari jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ekosistem pendidikannya telah mendapatkan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebinekaan dan sumber data dari Laporan Pusat Penguatan Karakter dan laporan dari provinsi dan kabupaten/kota.

Definisi Operasional IKK 1.3

Satuan	Provinsi & Kab/kota
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Puspeka
Sumber Data	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi & kab/kota
Polarisasi Indikator	Stabilize
Sumber Data	Triwulan

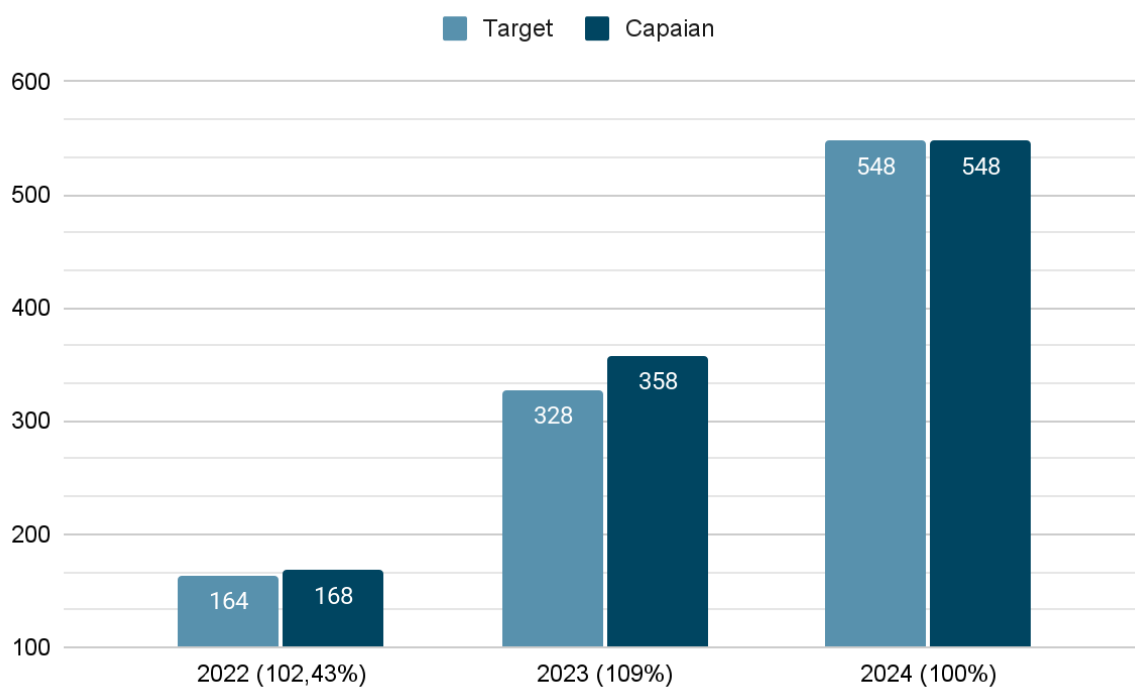


Diagram Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.3

Pada akhir tahun 2024, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis tersebut sebanyak 190 daerah (100% dari target tahun 2024). Sejak tahun 2022 s.d. 2024 jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan materi mencapai 548 daerah sesuai dengan yang ditargetkan dalam Renstra Puspeka. Ketercapaian IKK 1.3 diperoleh karena dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan program telah memahami secara mendalam materi dan regulasi terkait penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis.

Berikut rincian provinsi yang telah mendapatkan materi selama tahun 2024:

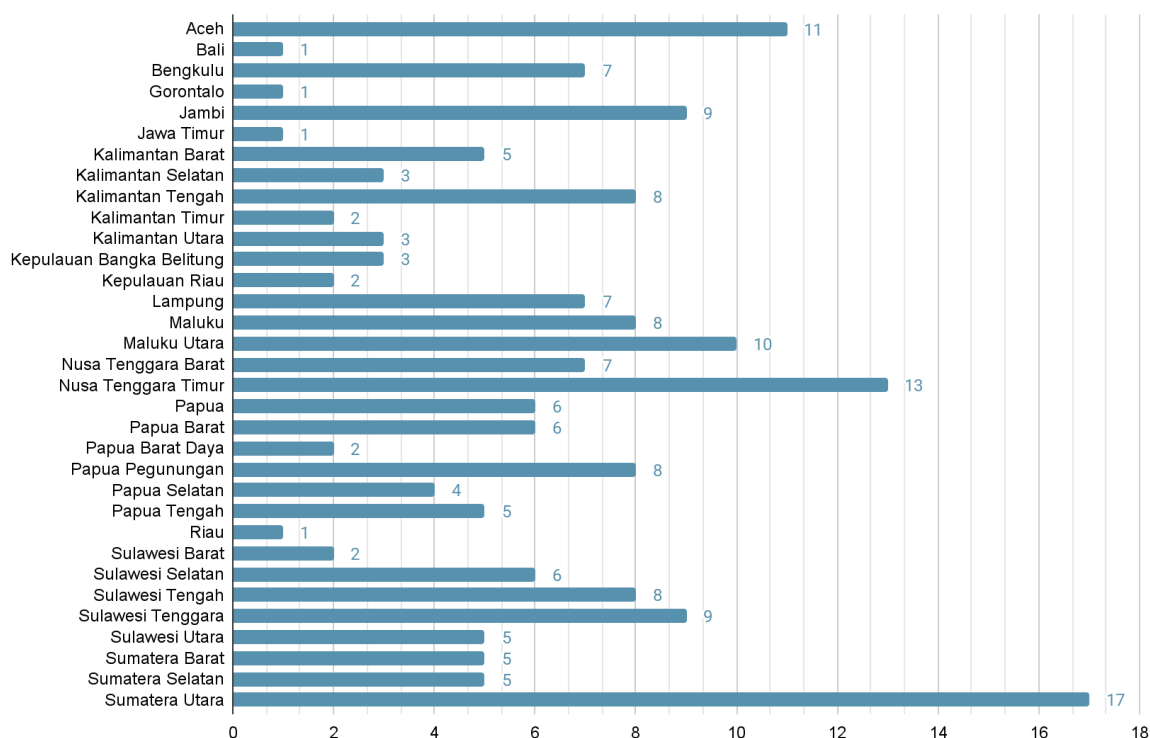


Diagram capaian provinsi dan kabupaten/kota IKK 1.3 tahun 2024

Program yang mendukung ketercapaian Indikator pada toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan, antara lain:

1. Menyampaikan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dilanjutkan dengan advokasi dan pendampingan untuk pengisian instrumen pengukuran capaian implementasi penguatan karakter terhadap substansi inklusivitas dan kebinekaan.



DKT Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan

2. Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi Lintas Sektor: memetakan program/kegiatan penguatan karakter terkait inklusivitas, kesetaraan gender, disabilitas, daerah terdepan terluar, tertinggal, serta membuka peluang kerja sama dan koordinasi terkait inklusivitas antar direktorat teknis (unit utama) dan kementerian/lembaga.

3. Pengembangan Sumber Belajar Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

Pengembangan buku saku untuk orang tua menjadi bunga rampai membangun inklusivitas yang berisi cara membangun iklim inklusivitas, ragam disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, serta kesetaraan gender bidang pendidikan.



Buku saku inklusivitas dan kesetaraan gender

4. Diseminasi Bunga Rampai Membangun Inklusivitas

Kegiatan penyebaran informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pandangan yang mendorong masyarakat untuk lebih inklusif, menghargai perbedaan, dan memperkuat keberagaman. Diseminasi ini bertujuan untuk membangun rasa inklusivitas di dalam suatu kelompok atau masyarakat menciptakan lingkungan pendidikan yang menyambut dan melibatkan semua anak, tanpa memandang latar belakang, status sosial, ras, gender, atau karakteristik lainnya.



Sosialisasi buku saku bunga rampai membangun inklusivitas

5. Sosialisasi Penguatan Karakter terkait Iklim Inklusivitas dan Kesetaraan Gender wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat

Memiliki tujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara gender. Kegiatan ini berfokus pada penguatan karakter individu dan kelompok agar lebih memahami dan menghargai keragaman serta kesetaraan hak dan peluang antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan.

6. Seminar Pendidikan Karakter yang Inklusif

Penerapan pendidikan karakter inklusif membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kemendikbudristek sebagai regulator kebijakan pendidikan memiliki peran sentral dalam mendorong dan mendukung implementasi pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, berperan aktif menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna. Kepala sekolah sebagai pemimpin institusi perlu memastikan adanya dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai. Satuan pendidikan lainnya, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kegiatan siswa, harus menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan karakter. Program-program sekolah, seperti ekstrakurikuler dan kegiatan sosial, harus dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran nilai-nilai karakter.



Seminar Pendidikan Karakter yang Inklusif

7. Aktivasi konten Hari Nasional dan Internasional

Aktivasi konten untuk merayakan Hari Nasional dan Internasional yang terkait dengan inklusivitas dan kesetaraan gender merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai tersebut, dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendorong perubahan positif.



Aktivasi konten Instagram inklusivitas

8. Pemilihan Konten dan Alih Bahasa untuk Bahan *Arigatou Fellowship Program*

Sebagai bentuk partisipasi aktif Indonesia di kancah internasional, Kemendikbudristek melalui Puspeka akan mengirimkan konten-konten penguatan karakter yang sejalan dengan tema *Arigatou Fellowship 2024*, yaitu “Membangun Masyarakat Global yang Damai dan Inklusif”. Konten-konten yang akan dikirimkan merupakan konten-konten yang diproduksi oleh Puspeka dan telah diseleksi sesuai dengan tema, sehingga mampu menggambarkan karakteristik dan budaya Indonesia. Konten-konten tersebut akan

dipromosikan dan ditampilkan di *Arigatou Fellowship* untuk memperkenalkan upaya penguatan karakter di Indonesia kepada warga negara lainnya. Konten-konten tersebut juga diharapkan dapat menjadi inspirasi/praktik baik penguatan karakter bagi warga dunia untuk diterapkan di negaranya masing-masing.



Konten kesetaraan gender

9. Program Temu Unjuk Kolaborasi Siswa Bineka (Tunas Bineka);

Program Tunas Bineka memberikan ruang kepada siswa SMA dan SMK dari berbagai latar belakang (sosial, ekonomi, suku, dan agama) untuk berinteraksi dan berkolaborasi menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi kesepakatan bersama. Program Tunas Bineka dirancang untuk mendorong nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan inklusi melalui pemberdayaan generasi muda. Program ini berfokus pada pelatihan, kolaborasi, dan pengembangan kreativitas, melibatkan berbagai kegiatan seperti lokakarya, diskusi, dan proyek berbasis komunitas.



Program Tunas Bineka

10. Kolaborasi bersama Guru Konten Kreator dalam rangka produksi konten (*above the line*) pengenalan keragaman;

Guru Konten Kreator memiliki potensi yang besar untuk membantu kampanye #BersamaCintaiKeragaman. Melalui konten aktivitas kreatif mengenalkan keragaman, GKK dapat memberikan contoh praktik baik tentang bagaimana nilai-nilai toleransi dan menghormati keberagaman dapat dikenalkan kepada siswa melalui aktivitas singkat dan sederhana.



Kolaborasi aktivasi konten Bersama Guru Konten Kreator

11. Aktivasi konten “Ruang Bincang Karakter (Ruang BK)” berjudul “Perempuan sebagai agen perdamaian”.

Ruang Bincang Karakter dengan tema “Perempuan sebagai agen perdamaian” mengupas peran perempuan dalam membangun dan menjaga perdamaian di berbagai aspek kehidupan. Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, episode ini menghadirkan diskusi mendalam tentang bagaimana perempuan mampu menjadi motor perubahan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Narasumber yang hadir dalam episode ini adalah Maria Ulfah Anshor, Komisioner Komnas Perempuan, Galih Sulistyaningra; Ratu Bintang Assyifa dari UN Women serta Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter. Ruang BK episode ini merayakan semangat perjuangan perempuan Indonesia sekaligus menginspirasi audiens untuk mendukung peran perempuan sebagai agen perdamaian.



Ruang BK Episode 9: Perempuan Sebagai Agen Perdamaian bagian 2 | Spesial Hari Kartini

Aktivasi konten ruang Bincang Karakter: Perempuan sebagai agen perdamaian

Analisa Ketercapaian

1. Diseminasi yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait membangun lingkungan inklusif baik fisik maupun non-fisik di kalangan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai *post-test* 725 peserta pada 5 daerah.

No	Daerah	Rerata Pre-Test	Rerata Post-Test	Kenaikan
1	Aceh	45.48	58.74	29.14%
2	Jawa Tengah	50.30	75.55	50.21%
3	Kepulauan Riau	47.86	73.18	52.89%
4	Bengkulu	63.75	79.17	24.19%
5	Kalimantan Selatan	64.57	88.00	36.28%

2. Sosialisasi yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia selain dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait membangun lingkungan inklusif baik fisik maupun non-fisik, dapat dimanfaatkan oleh para peserta dan menjadi salah satu kebijakan di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai hasil tindak lanjut dari sosialisasi.



SURAT EDARAN
Nomor : 421.1/4554/Dindikpora

Kepada Yth.

1. Koordinator Wilayah
2. Seluruh Pengawas TK, SD dan SMP
3. Kepala Sekolah Jenjang PAUD
4. Kepala Sekolah Jenjang SD
5. Kepala Sekolah Jenjang SMP
6. Kepala PKBM
7. Kepala SKB

se-Kabupaten Klungkung

Sehubungan dengan upaya mewujudkan lingkungan inklusif baik secara fisik dan non fisik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan disabilitas serta cerdas berbakat istimewa, dan juga meningkatkan iklim kesetaraan gender di seluruh ekosistem pendidikan, agar menyebarkan materi penguatan karakter terkait inklusivitas dan kesetaraan gender kepada sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar melalui tautan <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/inklusiivitas/>.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian.

Semarapura, 8 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung
DRS. I KETUT SUJANA, M.Pd.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671210.199412.1.007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BNPSE



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Teuku Umar No. 100, Kecamatan Nagan Raya
E-mail : dindik@naganykab.go.id
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

SURAT EDARAN
Nomor : 400.1/946

Yth. Sdr.

1. Para Pengawas Sekolah
2. Para Kepala Sekolah Jenjang SMP
3. Para Kepala Sekolah Jenjang SD
4. Para Kepala Sekolah Jenjang PAUD
5. Para Kepala PKBM
6. Kepala SPNF-SKB

Sehubungan dengan upaya dalam mewujudkan lingkungan inklusif baik secara fisik dan non fisik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan disabilitas serta cerdas berbakat istimewa, dan juga meningkatkan iklim kesetaraan gender di seluruh ekosistem pendidikan, agar menyebarkan materi penguatan karakter terkait inklusivitas dan kesetaraan gender kepada sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar melalui tautan <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/inklusiivitas/>.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian.

Suka Makmue, 22 Oktober 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya
SUKA MAKMUE
Pembina Utama Muda /
NIP. 19671210.199412.1.001

3. Seminar Pendidikan Inklusif

Pada seminar ini, Puspeka menggandeng komunitas dan organisasi mitra yang bergerak di bidang pendidikan dan isu inklusivitas sebanyak 1.232 orang secara daring dan luring. Seminar Pendidikan Karakter yang Inklusif untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua ini selain memberikan pengetahuan dan informasi, peserta akan melaksanakan rencana tindak lanjut setelah kegiatan.

4. Keterlibatan Puspeka pada kegiatan berskala internasional dalam *Arigatou Fellowship Program* di Abu Dhabi, UAE

menunjukkan bahwa Indonesia khususnya Kemendikbudristek telah melaksanakan program yang sesuai untuk capaian *Sustainable Development Goals*. Puspeka memaparkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait pendidikan etika di depan 10 negara peserta lainnya.





Perwakilan puspeka dalam menghadiri *Arigatou Fellowship* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

5. Aktivasi Hari Nasional dan Internasional

Konten yang telah dibuat dan diunggah ke media sosial yang dimiliki oleh Puspeka mendapatkan cukup perhatian dari masyarakat dengan dibuktikan jumlah penonton yang mengakses konten yang telah dibuat.

Tabel capaian jumlah penonton konten hari nasional dan internasional terkait inklusivitas dan kesetaraan gender

No	Judul Konten	Jumlah Penonton
1	Hari Perempuan Internasional	8.998
2	Hari Down Syndrome	8.340
3	Hari Peduli Autisme Sedunia	9.362
4	Hari Ayah Internasional dan Hari Keluarga Nasional	159.519
5	Hari Keadilan Internasional	12.270
6	Hari Olahraga Nasional 1	13.011
7	Hari Olahraga Nasional 2	13.028
8	Hari Perdamaian Sedunia	8.882
9	Hari Bahasa Isyarat	27.155
10	Hari Batik Nasional	7.775
11	Hari Penglihatan Sedunia	8.717

12	Hari Kesehatan Mental Sedunia	16.639
13	Hari Museum Nasional	6.713
14	Hari Ayah Nasional	10.896
15	Testimoni Ayah ASI	8.773
16	Hari Anak Internasional	7.996
17	Hari Disabilitas Internasional	26.334
18	Testimoni Nabila Ishma (Influencer Disabilitas)	9.779
19	Hari Ibu Nasional	20.846
Total		385.033

6. Program TUNAS BINEKA berhasil menguatkan nilai keberagaman kepada 200 siswa dan telah dikuatkan kepada 20 orang guru pendamping. Program TUNAS BINEKA telah memberikan penguatan karakter kepada peserta khususnya karakter mencintai dan menghormati keragaman individu lain untuk mencegah kekerasan dalam dunia Pendidikan khususnya diskriminasi dan intoleransi.
7. Program pelibatan Guru Konten Kreator (GKK) dalam mendiseminasikan aktivitas kreatif mengenalkan keragaman telah dilakukan dengan melibatkan 9 GKK dari provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan dari jenjang PAUD hingga SMA/K. Telah dihasilkan 10 konten kolaborasi yang sudah dilihat lebih dari 430.000 viewer per Desember 2024.

Kendala/Permasalahan

1. Belum masifnya diseminasi program inklusivitas dan kesetaraan gender kepada pemangku kepentingan lainnya di daerah;
2. Kurangnya pendampingan untuk memastikan program dapat tersebar luas;
3. Tidak semua sasaran konten terutama warganet dapat memahami maksud dan tujuan dari konten yang telah dibuat;
4. Program Temu Unjuk Kolaborasi Siswa masih dalam tahap pengembangan untuk jenjang SMA dan SMK, butuh kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain untuk pengembangan ke jenjang lain.

Langkah Antisipasi dan Strategis

1. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan keagamaan untuk implementasi kebijakan penguatan karakter;
2. Pengembangan bahan materi mengenai inklusivitas dan kesetaraan gender yang mudah

dipahami;

3. Menyesuaikan konten yang akan dibuat selanjutnya sesuai dengan masukan sasaran.
4. Memperluas jangkauan program Temu Unjuk Kolaborasi Siswa, terutama daerah rawan konflik.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.4

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter

Dalam mengimplementasikan penguatan karakter pada ekosistem pendidikan, tidak bisa hanya dilakukan oleh Kemendikbudristek tanpa dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintah yang konkuren, yaitu urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penguatan karakter.

Perhitungan dari IKK 1.4 diperoleh dari jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, isu 3 dosa besar pendidikan, dan inklusivitas dan kebinekaan. Tipe perhitungan IKK ini adalah kumulatif. Indikator kegiatan pada jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan diukur dengan cara sebagai berikut.

Tabel Definisi Operasional IKK 1.4.

Satuan	Provinsi & Kab/kota
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Puspeka
Sumber Data	Laporan Puspeka, Laporan Provinsi & kab/kota
Polarisasi Indikator	Stabilize
Sumber Data	Triwulan

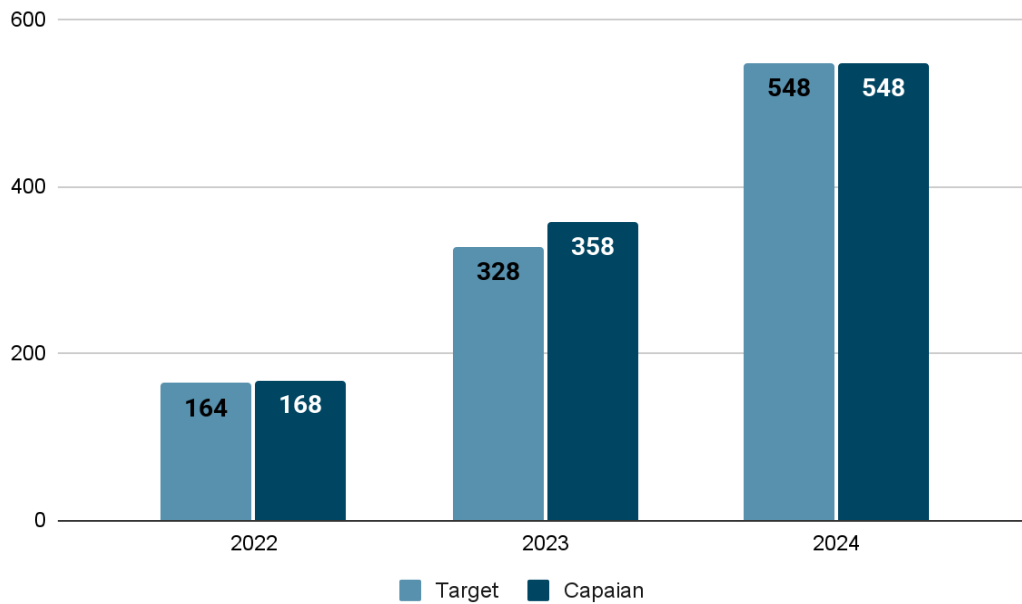


Diagram capaian IKK 1.4.

Tahun 2024, jumlah provinsi dan kabupaten kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter sebanyak 190 daerah (100% dari target tahun 2024). Ketercapaian ini diperoleh dikarenakan peran aktif dan komitmen pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, mengimplementasikan kebijakan/program yang relevan, mengalokasikan anggaran untuk melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, membentuk satgas pencegahan dan penanganan kekerasan, melibatkan ekosistem pendidikan lainnya dalam implementasi penguatan karakter, serta aktif memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi terkait penguatan karakter. Sejak tahun 2022 s.d. 2024, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter mencapai 548 daerah sesuai dengan yang ditargetkan dalam Renstra Puspeka.


BUPATI BULELENG
 PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
 PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan


PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Alpda Mu'an Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39372
 email: dikpora_kepahiang@yahoo.co.id Telp/Fax. (0732) 3930028

Kepahiang, Desember 2023

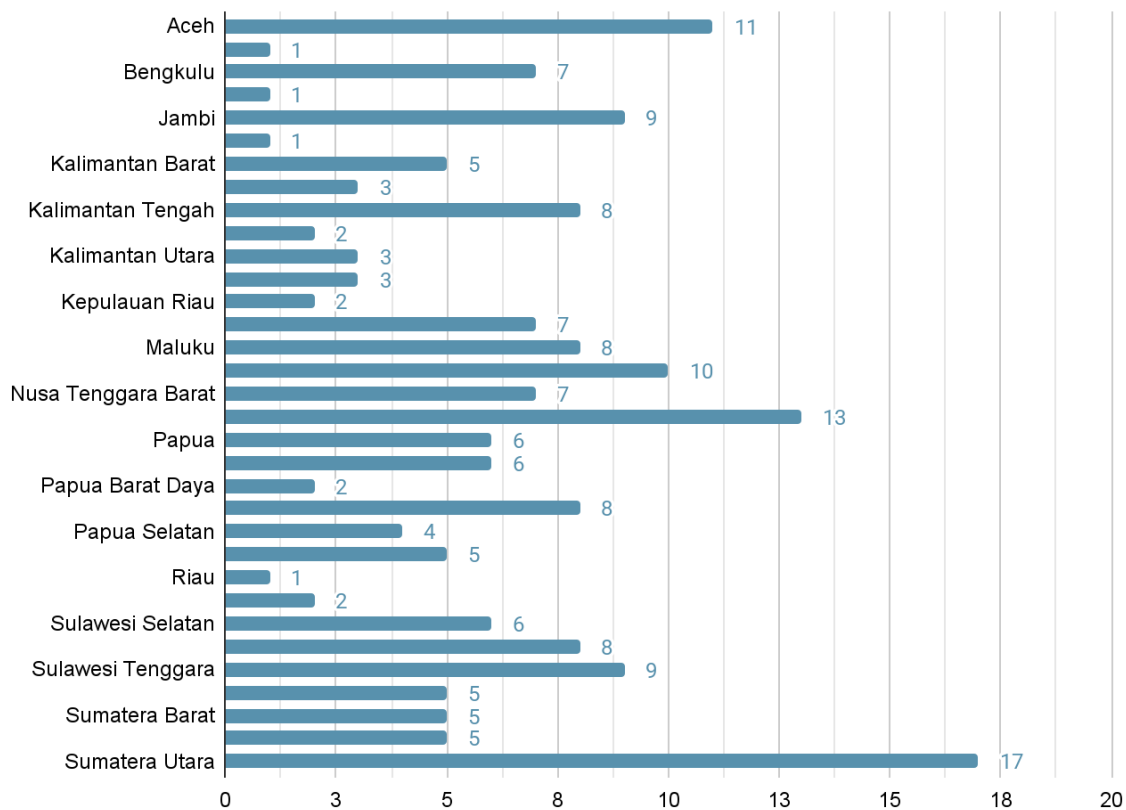
Nomor : 400.5 / 2023.3969 / Dikbud / 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth.
 Kepala BPMP Prov. Bengkulu
 di-
 Tempat

Dalam rangka mendukung Kegiatan Sosialisasi KSS, TPPK dan Sekolah Inklusi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut jenjang SD dan SMP yang dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 15 Desember 2023
 Tempat : Gedung Serba Guna
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Pukul : 08.00 WIB s.d selesai

Bentuk komitmen daerah terhadap penguatan karakter dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan dengan mengeluarkan Perda dan mengadakan sosialisasi



Grafik Capaian jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter pada tahun 2024

Program yang mendukung ketercapaian Indikator pada provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter:

1. Diskusi Kelompok Terpumpun terkait Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan. Dalam DKT ini Puspeka menggali apa yang telah dilakukan daerah dalam mengimplementasikan penguatan karakter;



Diskusi Kelompok Terpumpun bersama Ekosistem Pendidikan

2. Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan berupa peningkatan kapasitas yang salah satu tujuannya adalah mendorong satgas dan TPPK melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.



Gambar Peningkatan Kapasitas PPKSP

3. Kegiatan advokasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan diseminasi

terkait penguatan Profil Pelajar Pancasila, pencegahan kekerasan, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, serta perwujudan inklusivitas dan kebinekaan.

4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penguatan karakter secara luring dan daring atas substansi terkait Profil Pelajar Pancasila, pencegahan perundungan, pencegahan intoleransi, pencegahan kekerasan seksual, dan inklusivitas kebinekaan.



Pemantauan dan Evaluasi Program dan Produk Penguatan Karakter

5. Produksi Buku dan Video Praktik Baik Penguatan Karakter. Salah satu inisiatif untuk mewujudkan gerakan bersama dalam memberikan pengaruh positif kepada daerah dan pemangku kepentingan adalah dengan menyusun buku dan video praktik baik penguatan karakter agar semakin banyak praktik baik yang diangkat dari berbagai daerah yang dikampanyekan dalam bentuk video serta buku agar lebih mudah dipahami.



Produksi Buku dan Video Praktik Baik Penguatan Karakter

6. Pemberian Apresiasi Cerdas Berkarakter kepada daerah yang telah berkomitmen dalam

mengimplementasikan kebijakan penguatan pendidikan karakter.



Apresiasi Cerdas Berkarakter

Analisis Ketercapaian

Beberapa faktor keberhasilan dalam mendorong komitmen daerah dalam melaksanakan penguatan karakter antara lain:

1. Amanat Permendikbudristek 46 Tahun 2023 yang mengharuskan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga 27 provinsi dan 444 kabupaten/kota memiliki komitmen dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
2. Diskusi Kelompok Terpumpun Penguatan Karakter mengadvokasi daerah untuk mengimplementasikan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila, penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, serta inklusivitas kebinekaan dimana daerah menyampaikan praktik baik penguatan karakter yang telah mereka lakukan di daerahnya;
3. Puspeka membuka peluang kolaborasi dengan daerah melaksanakan peningkatan kapasitas Program Pencegahan Perundungan yang telah dilaksanakan bersama beberapa pemerintah daerah antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Kota Manado, Kota Medan, Kota Denpasar, dan Kota Bandung;
4. Kemendikbudristek bersurat kepada kepala daerah seluruh Indonesia untuk melakukan perencanaan dan penganggaran terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemendikbudristek juga menambahkan indikator pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rincian komponen penggunaan dana BOS agar sekolah dapat menganggarkan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah;

5. Kemendikbudristek bersinergi bersama Kemendagri untuk menyampaikan kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk membentuk satgas PPKSP, melakukan sosialisasi, melaksanakan bimbingan teknis, dan peraturan terkait PPKSP;
6. Puspeka melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada daerah-daerah dengan letak geografis yang sulit untuk diakses untuk menyebarkan informasi, dan mengadvokasi daerah agar melaksanakan penguatan karakter.

Kendala/Permasalahan

Kendati IKK 1.4 telah mencapai target sesuai dengan Renstra, tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pemenuhan capaian IKK 1.4, antara lain:

1. Belum semua daerah berkomitmen dalam membentuk Satgas PPKSP dan juga membuat peraturan terkait penguatan karakter sehingga program penguatan karakter belum dapat berjalan maksimal;
2. Bukti implementasi penguatan karakter yang dilaksanakan oleh daerah belum terinventarisasi dan terdokumentasi dengan baik;
3. Daerah memiliki program prioritas daerah berbeda sehingga sumber daya lebih dialokasikan pada program prioritas daerah.

Langkah Antisipasi/Strategi

Strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi agar komitmen daerah terkait penguatan karakter dapat berjalan optimal antara lain:

1. Melakukan advokasi kepada daerah terkait kebijakan/program penguatan karakter yang bisa disisipkan dalam program/agenda yang sudah ada;
2. Puspeka aktif mengirimkan formulir evaluasi hasil implementasi penguatan karakter yang telah dilakukan daerah, dan melakukan rekapitulasi terhadap hasil yang disampaikan;
3. Puspeka membuka peluang berkolaborasi bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan organisasi mitra dalam melaksanakan beberapa program penguatan karakter di daerah;
4. Mendokumentasikan komitmen dan praktik baik penguatan karakter yang telah dilakukan oleh daerah dalam bentuk buku dan video praktik baik penguatan karakter;
5. Memberikan apresiasi kepada daerah yang telah berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan penguatan pendidikan karakter Profil Pelajar Pancasila, melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan di dunia pendidikan, dan juga penguatan iklim inklusivitas dan kebinekaan.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter

Ketercapaian Sasaran Kinerja meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter ditandai dengan nilai SAKIP Pusat Penguatan Karakter pada Tahun 2024 sebesar 90,05 atau predikat AA. Capaian ini cenderung naik dari tahun lalu, yang mana nilai SAKIP pada tahun 2023 sebesar 90,00 menjadi 90,05 di tahun 2024.

Selain itu Pusat Penguatan Karakter memperoleh realisasi Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L PUSPEKA sebesar 98,90 yang melebihi target sebesar 96,91. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Pusat Penguatan Karakter meraih nilai 96,90 sehingga dari tahun 2023 ke tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran cenderung naik.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014).

Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan:

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja;
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I;
3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga; adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/Lembaga.

Selanjutnya, penyelenggaraan SAKIP mencakup:

- 1) Rencana Strategis;
- 2) Perjanjian Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pengelolaan Data Kinerja;
- 5) Pelaporan Kinerja;
- 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
Perencanaan Kinerja	30%
Pengukuran Kinerja	30%
Pelaporan Kinerja	15%
Evaluasi Internal	25%
Total Nilai	100%

Nilai SAKIP = 30% (Perencanaan Kinerja) + 30% (Pengukuran Kinerja) + 15% (Pelaporan Kinerja) + 25% (Evaluasi Kinerja)

Tabel Definisi Operasional IKK 2.1

Satuan	Predikat
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Puspeka
Sumber Data	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahnan

Pada tahun 2024, predikat SAKIP yang ditargetkan PUSPEKA minimal A (Memuaskan) dan pencapaian realisasinya mampu meraih predikat AA (Sangat Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa PUSPEKA mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik, memperkuat sistem manajemen kinerja yang andal, dan kemauan mendukung upaya perubahan ke arah yang lebih baik.

Pada tahun 2023, PUSPEKA mendapatkan Predikat SAKIP A (Memuaskan) dan predikat SAKIP yang diraih PUSPEKA meningkat pada tahun 2024 di predikat AA (Sangat Memuaskan). Dengan kata lain, perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal yang telah dilakukan oleh PUSPEKA sudah dilakukan dengan memuaskan.

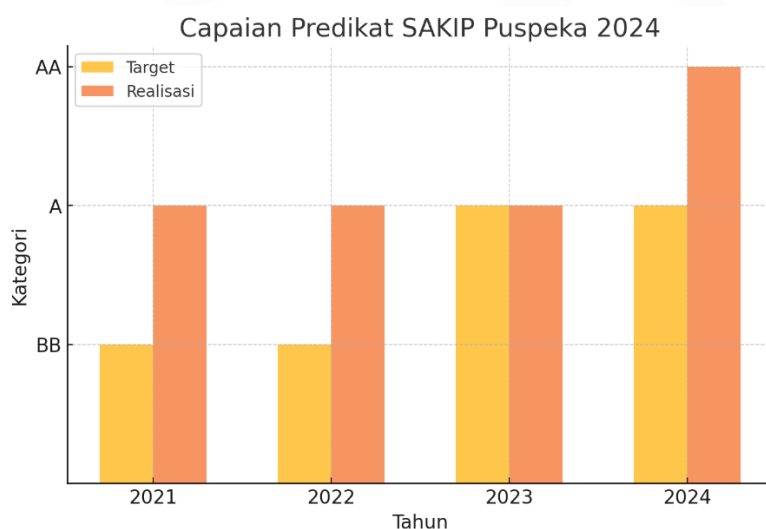


Diagram capaian predikat SAKIP 2024

Peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 adalah keberhasilan Puspeka dalam melaksanakan program, kegiatan, dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan, standar dan prosedur serta mengoptimalkan peran dan keterlibatan ketatausahaan dalam melakukan pemantauan sistem akuntabilitas kinerja, antara lain::

1. Melakukan koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun yang lalu;
2. Menyampaikan laporan triwulan dan semester secara berkala yang terdiri dari evaluasi kinerja, anggaran, maupun capaian IKK di lingkungan Pusat Penguatan Karakter dengan akurat dan tepat waktu;
3. Mereviu Prosedur Operasional Standar di lingkungan Pusat Penguatan Karakter secara berkala;
4. Melakukan reformasi birokrasi internal dengan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
5. Melakukan pemenuhan dan mereviu dokumen pendukung SAKIP secara berkala;
6. Menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan capaian Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait capaian kinerja yang dimandatkan dari Kementerian/Lembaga lainnya secara akurat dan tepat waktu.

Analisa Ketercapaian

1. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja, dan memantau capaian kinerja secara berkala;
2. kuatnya komitmen seluruh pegawai Pusat Penguatan Karakter dalam upaya mencapai kinerja SAKIP dengan predikat AA yang ditunjukkan melalui penguatan koordinasi dan administrasi secara teratur dan berkala.

Kendala/Permasalahan

1. Adanya pengalihan tugas penyusun SAKIP karena mutasi pegawai ke satuan kerja lain, sehingga petugas penyusun SAKIP yang baru perlu mempelajari petunjuk teknis secara intensif;
2. Pelantikan Presiden dan para Menteri serta Pimpinan Lembaga yang menyebabkan perubahan struktur organisasi, target program Quick Wins Kementerian, dan jadwal pelaksanaan kegiatan Kementerian.

Langkah Antisipasi/ Strategis

1. Meningkatkan kompetensi pegawai, termasuk dalam bidang akuntabilitas kinerja, dengan mempelajari petunjuk teknis penyusunan SAKIP secara intensif;
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara proaktif dengan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Biro Perencanaan, Kementerian PAN RB serta pihak-pihak terkait, untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
3. Melakukan reviu jadwal kegiatan dan efisiensi pelaksanaan anggaran secara berkala, agar dapat mencapai target Perjanjian Kinerja dan tetap memenuhi target Quick Wins Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Indikator Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L PUSPEKA minimal 85

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

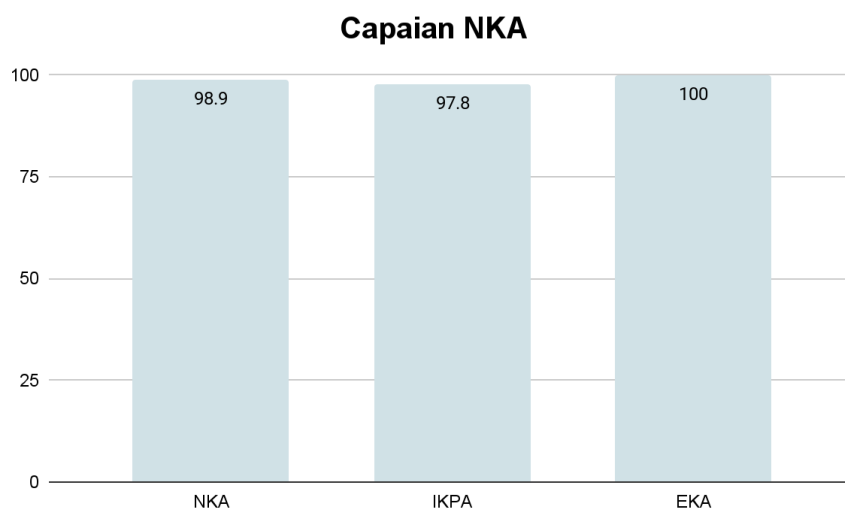
Tabel Definisi Operasional IKK 2.2

Satuan	Nilai
Tipe Perhitungan	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	Puspeka
Sumber Data	E-Monev Kemkeu
Polarisasi Indikator	Maksimal
Sumber Data	Bulanan

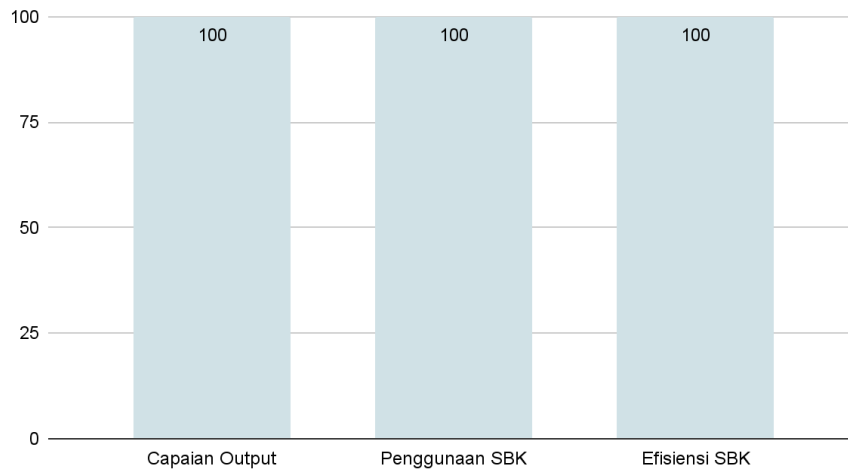
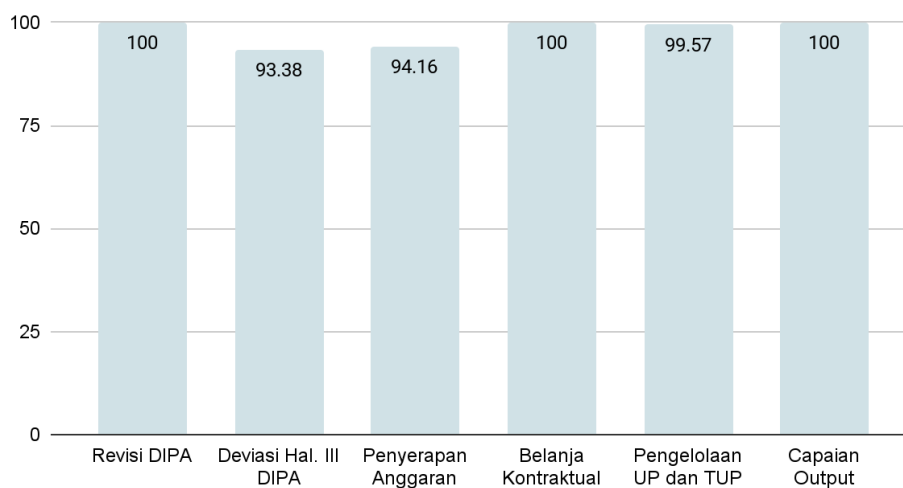
Pada tahun 2024, komponen penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini karena adanya penggunaan Rincian Output Standar Biaya Keluaran. Untuk perhitungan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran yang baru, digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Evaluasi Kinerja Anggaran} = [75\% \times \text{Capaian Output}] + [10\% \times \text{Penggunaan SBK}] + [15\% \times \text{Efisiensi SBK}]$$

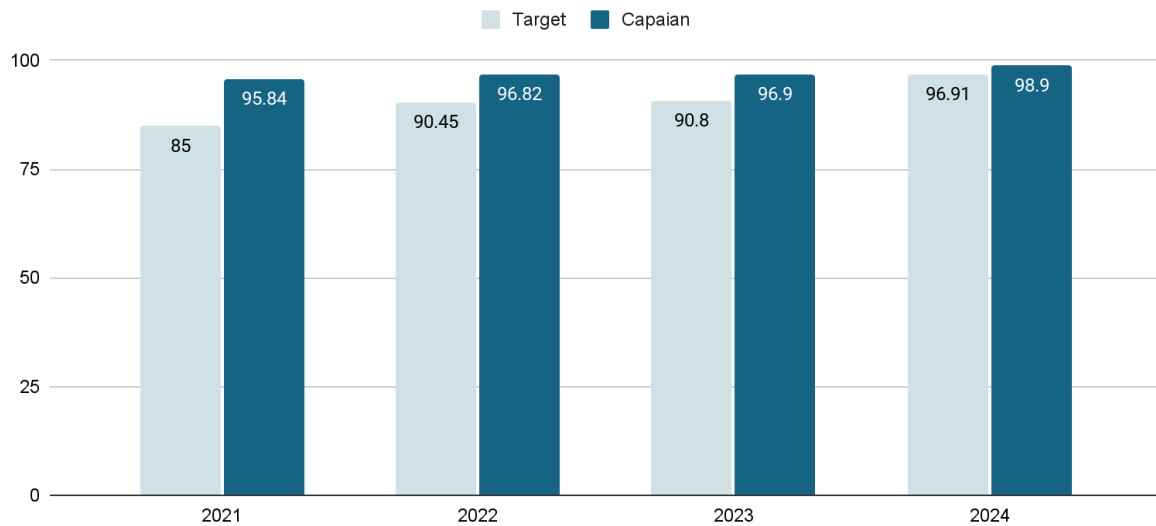
Berikut rincian capaian kinerja berdasarkan masing-masing komponennya:



Capaian NKA Puspeka

Capaian EKA**Capaian EKA Puspeka****Capaian IKPA****Capaian IKPA Puspeka**

Capaian EKA dan IKPA PUSPEKA sebesar 100 dan 97,80. berdasarkan kedua capaian tersebut, maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 98,90. Capaian tersebut telah melampaui target dari renstra sebesar 91,15 dan target dari Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 96,91.



Capaian NKA tahun 2021 – 2024

Untuk capaian Nilai Kinerja Anggaran, apabila dibandingkan realisasi pada tahun 2023 cenderung meningkat di tahun 2024. Hal ini disebabkan Puspeka telah melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dan berkomitmen mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan, sehingga hal ini menjadi faktor ketercapaian Nilai Kinerja Anggaran Puspeka saat ini.

Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut antara lain didukung dengan:

1. Melakukan pemantauan kinerja anggaran per triwulan, semester, dan tahunan di lingkungan Pusat Penguatan Karakter;
2. Melaporkan capaian output melalui aplikasi SAKTI;
3. Pelaksanaan tagging Rincian Output Standar Biaya Keluaran;
4. Melaksanakan pengelolaan anggaran secara konsisten dan tepat waktu untuk mempertahankan nilai pada komponen IKPA dan EKA tetap maksimal;
5. Menyusun Laporan Keuangan Satker Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan.

Analisa Keberhasilan

1. Melaporkan capaian output secara tepat waktu;
2. Menjaga konsistensi komponen yang ada pada IKPA agar tetap mendapatkan nilai maksimal;
3. Melakukan tagging Rincian Output Standar Biaya Keluaran karena adanya perubahan penilaian komponen Evaluasi Kinerja Anggaran;
4. Dalam menjalankan anggaran mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

Kendala/Permasalahan

1. Penyerapan anggaran yang belum konsisten karena adanya kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas;
2. Adanya dispensasi belanja perjalanan dinas namun dengan batas waktu yang sempit yang ditentukan dari Langkah-Langkah Akhir Tahun.

Langkah Antisipasi dan Strategis

1. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*), dengan melaksanakan program dan kegiatan yang prioritas dan membatasi pelaksanaan kegiatan yang urgensinya rendah serta tetap memantau capaian target kegiatan;.
2. Menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk pembayaran tagihan-tagihan.

Realisasi Anggaran

Capaian Anggaran

Pagu anggaran PUSPEKA pada DIPA awal tahun 2024 sebesar Rp 67.876.276.000. Namun di tahun 2024 terdapat blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 2.500.000.000 dan blokir perjalanan dinas sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 sebesar Rp. 500.000.000. Dari pagu anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 64.419.003.051 dengan persentase daya serap sebesar 94,91%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Puspeka berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 4,42% atau Rp 3.000.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp 67.876.276.000. Efisiensi anggaran berdasarkan hal berikut:

1. Efisiensi anggaran berdasarkan *Automatic Adjustment* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak terduga sebesar Rp. 2.500.000.000;
2. Melakukan *self blocking* anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai penghematan yang dilakukan oleh satuan kerja sesuai dengan surat Menteri

Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024;

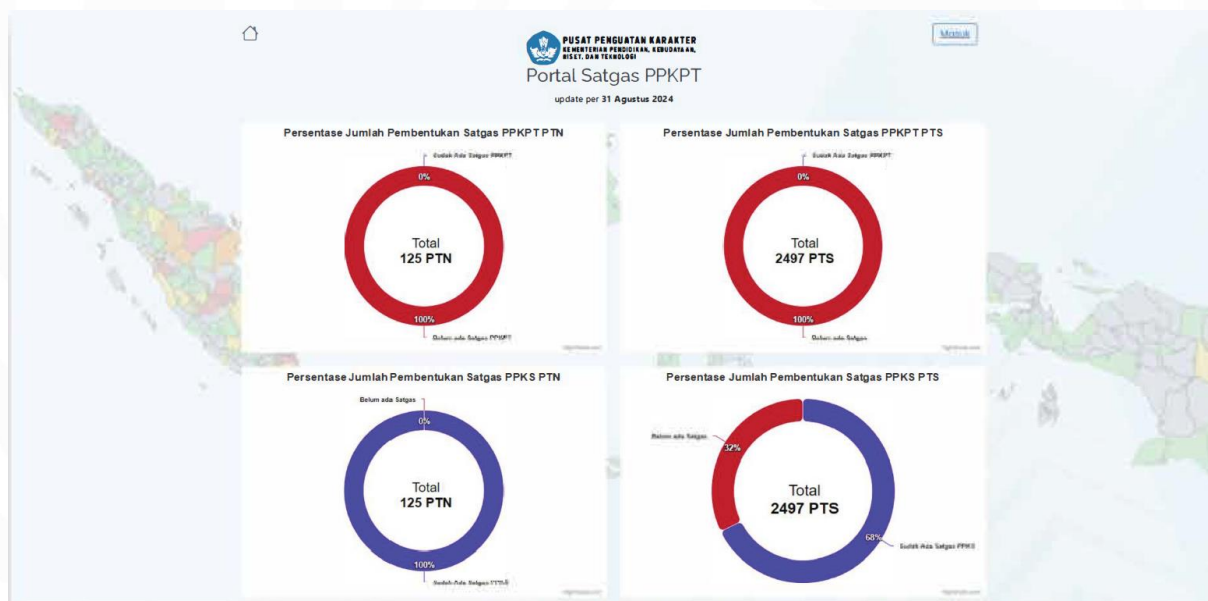
3. Puspeka telah melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan media rapat daring memungkinkan pelaksanaan kegiatan dengan hasil yang mencapai target yang telah ditetapkan;
 - b. Perubahan lokasi kegiatan ke berbagai wilayah sebagai bagian dari efisiensi, di mana paket meeting yang awalnya dilaksanakan di hotel dialihkan ke UPT Kemendikbudristek dan Penyesuaian jumlah hari pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil efisiensi dapat dimanfaatkan untuk menambah sasaran program *quick wins* (percepatan implementasi pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan berdasarkan Permendikbudristek no. 46 tahun 2023) dan peluncuran program 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat;

Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

Inovasi

Pada tahun 2024, Puspeka melakukan sebagai berikut:

1. Pengembangan Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
Pengembangan laman ini dilatarbelakangi oleh Peluncuran Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Pada 17 Oktober 2024 telah disosialisasikan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) sebagai revisi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dimana cakupannya lebih luas lagi tidak hanya kekerasan seksual. Sehingga, puspeka telah mengembangkan Portal PPKPT sebagai pengganti Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sebelumnya telah digunakan oleh setiap admin Perguruan Tinggi. Pada portal terbaru ini, dibuat khusus untuk admin LLDIKTI yang dapat mengakses dan menggunakannya. Portal PPKPT dapat diakses melalui www.merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppkpt



Tampilan portal Satuan Tugas PPKPT

DASBOR PPKPT

Form Tambah Data Satgas PPKPT PTN

Form Input

10 entries per page

#	Nama Universitas	Status Satgas	Jumlah Satgas	Progress	Action
1	Universitas Nusa Cendana	Masih Satgas PPKS	23	Masih Satgas PPKS	Unggah ST
2	Universitas Timor	Masih Satgas PPKS	18	Masih Satgas PPKS	Unggah ST
3	Politeknik Negeri Kupang	Masih Satgas PPKS	11	Masih Satgas PPKS	Unggah ST
4	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Masih Satgas PPKS	7	Masih Satgas PPKS	Unggah ST

Showing 1 to 4 of 4 entries

Tampilan portal Satuan Tugas PPKPT

2. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dirancang berdasarkan perspektif agama, filsafat, dan pendidikan, dengan tujuan melahirkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia, disiplin, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Melalui pembiasaan ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat memiliki pondasi karakter yang kuat yang bermanfaat, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masa depan bangsa.



Gambar kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Dalam rangka sosialisasi dan pengenalan gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan, Pusat Penguatan Karakter telah melakukan lomba Kreasi Cipta Lagu Anak Nusantara (KELANA) yang menghasilkan 24 pemenang lagu, dengan juara 1, 2, dan 3 pada delapan kategori yang dilombakan, mengadopsi nilai-nilai pada Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.



Peresmian Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Penghargaan

Pada tahun 2024, Puspeka mendapatkan penghargaan, antara lain:

1. Penghargaan IKPA Awards

Pada tahun 2024, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta III Nomor KEP-67/KPN.1203/2024 tentang Penetapan Peringkat Terbaik Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Tahun Anggaran 2023, Pusat Penguatan Karakter mendapatkan penghargaan dari KPPN Jakarta III, peringkat I dengan jumlah transaksi *Cash Management System* (CMS) terbanyak cluster pagu sedang Tahun Anggaran 2023.



Penyerahan Penghargaan IKPA Awards

2. Penghargaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Puspeka menerima penghargaan Satuan Kerja yang meraih Zona Integritas menuju

Bebas dari Korupsi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Tahun 2024.



Penghargaan ZI-WBK dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2024, PUSPEKA dalam memenuhi target capaian kinerja melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain:

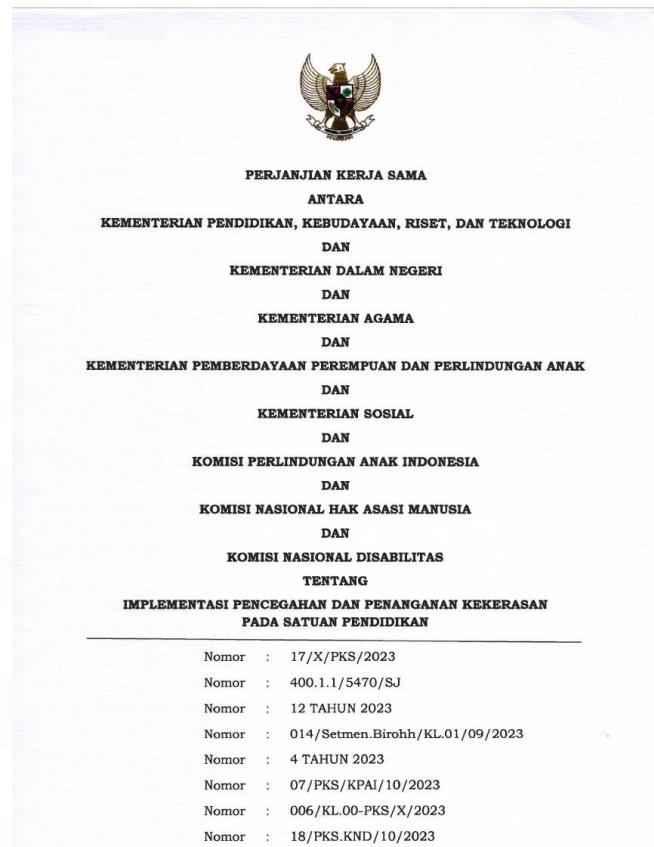
- 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan lima kementerian dan tiga lembaga untuk turut memenuhi amanah percepatan pembentukan TPPK dan Satgas Kabupaten/Kota. Kolaborasi ini terangkum ke dalam Nata Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023 lalu. Penandatanganan dilakukan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang diwakili Sekretaris KemenPPA Pribudiarta Nur Sitepu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Sholihah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro, Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia.



Penandatanganan Nota Kesepahaman PPKSP

Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman PPKSP pun dilakukan berbentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam implementasi pencegahan dan kekerasan pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, masing-masing kementerian dan lembaga dapat meningkatkan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi dari lima kementerian dan tiga lembaga tersebut dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, ramah dan aman. Pada Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2023. Lingkup kerja sama meliputi penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pengawasan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, dan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi.

Saat ini, capaian pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satgas provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 406.759 TPPK, 27 Satgas Provinsi, dan 444 Satgas Kabupaten/kota. Seiring berjalan waktu, diharapkan akan mencapai 100% yang telah membentuk TPPK dan satgas provinsi dan kabupaten/kota.



Perjanjian Kerja Sama Implementasi PPKSP

- 2) Kemendikbudristek telah menerbitkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada penyusunan regulasi ini berkolaborasi dengan beberapa lembaga dan Jaringan Masyarakat Sosial, antara lain dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) Universitas Indonesia, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI), Yayasan Perempuan Indonesia Tumbuh Berdaya (Pribudaya), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, Wahid Foundation, Yayasan Cahaya Guru, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, beberapa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam prosesi penerbitan Permendikbudristek. Pusat Penguatan Karakter berperan diantaranya menyusun regulasi bersama pihak-pihak terkait, menyusun pedoman teknis, materi, hingga pembentukan satuan tugas.
- 3) Kolaborasi Percepatan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satuan Tugas pemerintah daerah yang dilakukan melalui berbagai pihak baik di internal Kemendikbudristek maupun eksternal Kemdikbudristek.

Kolaborasi dengan internal Kemdikbudristek

Percepatan dilakukan dengan penguatan Tata Kelola melalui Surat Edaran

Mendikbudristek, Juknis Sesjen Kemendikbudristek, Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek, dan Surat Edaran kepala UPT Kemendikbudristek di wilayah tugas masing-masing. sosialisasi juga dilaksanakan dalam bentuk edukasi secara daring, luring, hibrida, dan juga melalui berbagai media.



SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/M/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Mengingat	1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
		Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156);
		Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963);
		Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Penanganan Kelelahan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 988).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 28768/A.14/PK.00/2023 30 Agustus 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan

- Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Kepala Satuan Pendidikan
6. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
8. Kepala Balai Besar/Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, kami mohon Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan resmi memberikan dan menetapkan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.
2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan tugas:
 - a. membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru
 - b. mengorganisasi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) keanggotaan satuan tugas berjumlah maksimal 5 (lima) orang;
 - 2) keanggotaan satuan tugas terdiri atas unsur:
 - a) perwakilan dinas pendidikan;
 - b) perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak;
 - c) perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial; dan
 - d) organisasi atau bidang fungsi yang terkait dengan pendidikan.
 - 3) keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud diperyaratkan:
 - a) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
 - b) tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) tidak pernah dan atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau lebih berat.
 - c) peryaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 3) diumumkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan diibubahi mestinya (contoh formulir terlampir);
 - d) satuan tugas dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur perwakilan Dinas Pendidikan.



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 16 Februari 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Yth.
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
seluruh Indonesia

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kementerian/Lembaga sebagai Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Hal yang termasuk dalam urusan pemerintahan adalah urusan pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Data tingkat nasional atas capaian dan target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan.
2. Data tingkat provinsi atas capaian dan rekomendasi target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan, sesuai kewenangannya.
3. Data tingkat kabupaten/kota atas capaian dan rekomendasi target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan, sesuai kewenangannya.
4. **Pemetaan sub-kegiatan** yang menjadi prioritas utama dalam pemenuhan indikator kinerja urusan bidang pendidikan. Pemetaan mencakup:

- sub-kegiatan beserta kode, nomenklatur, kinerja, indikator, satuan;
- definisi operasional yang terdiri dari deskripsi, operasionalisasi, dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); dan
- indikator akar masalah yang berasal dari Rapor Pendidikan.

Lebih lanjut, dapat kami sampaikan bahwa Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan merujuk pada indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Indikator tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan di daerah, dan digunakan dalam pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortek) Tahun 2024. Seluruh dokumen dapat diunduh melalui tautan <http://ringkas.kemendikbud.go.id/sampiran/data/SPM024>. Pemerintah daerah juga dapat mengakses seluruh dokumen tersebut dalam Aplikasi Rapor Pendidikan Daerah.

Selain hal tersebut, kami sampaikan juga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus untuk diskusikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pentingnya pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran berdasarkan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan yang perlu ditingkatkan, analisis akar masalah dan capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemenuhan *sub-kegiatan* yang sesuai akar masalah dan masing-masing Pemerintah Daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Terkat hal ini, Pemerintah Daerah dapat memenuhkan dan dan pemetaan yang kami sajikan melalui lampiran yaitu ini maupun Rapor Pendidikan.

← **Posts**

cerdas her karakter kemdikdasmen and 3 of



1,330 31 104

 Liked by widi_widiy and others

cerdasberkarakter.kemdikdasmen [#SahabatKarakter](#),
[#SobatBelajar](#), [#SahabatGTK](#), [#KawanSMK](#), di awa... more

1 March 2024 · See translation



10.3K 78 1,275

👍👍👍 Liked by mpritulsumintul and others

cerdasberkarakter.kemdikdasmen "Pendidikan haruslah menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatanya... more

8 July 2024 · See translation



Kolaborasi dengan Eksternal Kemendikbudristek

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKs) dalam PPKSP, kolaborasi dilaksanakan dalam bentuk menyiapkan tata kelola mendukung percepatan bersama Kementerian Dalam Negeri.



Surat Kemendagri dan gelar wicara perencanaan implementasi PPKSP

BAB IV

PENUTUP

Simpul an Umum

Selama tahun 2024, Pusat Penguatan Karakter berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan yang terdiri dari dua (2) Sasaran Kegiatan dengan enam (6) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

Tabel capaian IKK Puspeka

Kode	Uraian	Target	Capaian	%
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan	548	548	100%
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	548	548	100%
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem Pendidikan	548	548	100%
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	548	548	100%
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	548	548	100%
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter			
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A	AA	100,05%
IKK 2.2	2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	96,91	98,90	102,05%

Pada tahun 2024, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penguatan Karakter dapat tercapai dengan baik sesuai akhir renstra. Capaian tersebut didukung oleh penyerapan anggaran yang mencapai Rp 64.419.003.051 dari total pagu sebesar Rp 67.876.276.000 dengan persentase sebesar 94,91%.

Pagu Anggaran

Rp. 67.876.276.000

Realisasi

Rp. 64.419.003.051

Persentase

94,91%

Diagram Realisasi Anggaran Puspeka

Rekomendasi

Dari evaluasi kinerja, beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Beberapa daerah sasaran diseminasi produk penguatan karakter adalah daerah dengan letak geografis yang sulit dijangkau sehingga sulit untuk mengikuti kegiatan secara luring, dan terkendala koneksi internet untuk mengikuti kegiatan secara daring;
2. Beberapa satuan Pendidikan belum membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan pemerintah daerah yang belum membentuk Satgas karena lokasi satuan pendidikan yang terpencil dan sulit dijangkau oleh Dinas/UPT;
3. Satgas, TPPK, dan fasilitator guru (Program Pencegahan Perundungan, Pencegahan Kekerasan, Pencegahan Kekerasan Seksual) belum memperoleh pengetahuan dan pemahaman penuh terkait pencegahan dan penanganan kekerasan karena peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Puspeka belum dapat menjangkau semua daerah secara luring, sementara beberapa daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas secara daring terkendala jaringan yang kurang stabil;
4. Masih kurangnya kolaborasi antara Puspeka dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program penguatan karakter di daerah;
5. Belum semua daerah mengalokasikan anggaran untuk penguatan karakter dan pencegahan serta penanganan kekerasan sehingga masih ada daerah yang belum maksimal mengimplementasikan program penguatan karakter.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, terdapat beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pusat Penguatan Karakter ke depannya antara lain:

1. Memproduksi dan mengkampanyekan produk penguatan karakter baik melalui *above the line* (melalui media massa dan media sosial) dan melalui *below the line* (sosialisasi, diskusi kelompok terpumpun, diseminasi, dan lain-lain);
2. Puspeka berkolaborasi dengan UPT mendorong dan mengadvokasi pemerintah daerah untuk membentuk Satgas, dan satuan pendidikan untuk membentuk TPPK;
3. Memaksimalkan peran UPT untuk mengadvokasi dan menyebarkan informasi program penguatan karakter, serta aktif menyebarkan materi pada media sosial dan laman Puspeka;
4. Melakukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan program penguatan karakter serta program pencegahan dan penanganan kekerasan;
5. Berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk penguatan karakter dan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran Kemendagri.

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Awal dan Akhir 2024



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Pusat Penguatan Karakter
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusprita Putri Utami
Jabatan : Kepala Pusat Penguatan Karakter
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,



Kepala Pusat Penguatan Karakter,



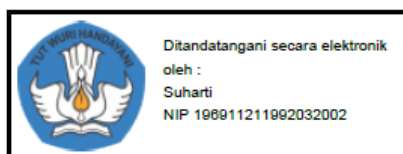
Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	[1.1] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	548
[1.0] Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	[1.2] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	548
[1.0] Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	[1.3] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	548
[1.0] Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	[1.4] Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	548
[2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	[2.1] Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	96.91

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 10.944.487.000,-
2.	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 56.931.789.000,-
Total Anggaran			Rp. 67.876.276.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Penguatan Karakter,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Pengukuran Kinerja tahun 2024

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan								
Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	443	478	513	548	443	478	513	548
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	434	473	512	548	434	473	512	548
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	406	454	502	548	406	454	502	548
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	406	454	502	548	406	454	502	548
Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter								
Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	-	-	-	A	-	-	-	AA
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	-	-	-	96,91	-	-	-	98,90

Surat Pernyataan Telah Direviu**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT PENGUATAN KARAKTER**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5746121, Faksimile (021) 5746121, Laman : <https://puspeka.kemdikbud.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PUSAT PENGUATAN KARAKTER
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Penguatan Karakter untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2025
Ketua Tim Reviu,

Aprillia Anjarsari, S.E.
NIP 199004042018012001

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒